

**PENGARUH PENGAWASAN LANGSUNG PIMPINAN TERHADAP
EFEKTIFITAS PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
DI KANTOR DINAS PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN JEMBER**

S K R I P S I



Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1)
Jurusan Ilmu Administrasi Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember



Asa:	Hadiah	Klass
Terbitan	27 AUG 2002	352
No. Induk	1476	DWI
Oleh : KLASIR / PENYALAH	Idaw	P

S
C-1

Cherry Dwi Risdianto

NIM : 950910201186

Dosen Pembimbing
Drs. Kholiq Ashari, Msi
Drs. Soeranto Soerantomo

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

2002

**Pengaruh Pengawasan Langsung Pimpinan Terhadap
Efektifitas Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Di Kantor Dinas Pendapatan Daerah
Kabupaten Jember**



MOTTO:

“Orang yang ditemani uang biasanya berani berlagak, itu menandakan orang itu seorang yang rendah diri, tapi kalau orang yang mempunyai kepercayaan dirinya tebal dia akan tetap sama walau tak mempunyai uang sepeserpun di saku, karena dirinya adalah pribadinya bukan ukuran dirinya setaraf dengan uangnya”

Basino, Titis. 1997. *Welas Asih merengkuh Tajali*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.

Kupersembahkan karya tulis ini untuk
Ayah dan bunda yang mulia serta untuk almamaterku
Universitas Jember



PENGESAHAN

TELAH DITERIMA DAN DIPERTAHANKAN DIHADAPAN
TIM PENGUJI SKRIPSI GUNA MEMENUHI SALAH SATU SYARAT
UNTUK MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU (S1)
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PROGRAM STUDI ADMINISTRASI
NEGARA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
PADA

HARI : Kamis
TANGGAL : 27 Juni 2002
JAM : 08.00 – 10.00

PANITIA PENGUJI

KETUA

(Drs. H. M. Toerki)

SEKRETARIS

(Drs. Abd. Kholiq Ashari, Msi)

ANGGOTA TIM PENGUJI

1. Drs. H. M. Toerki
2. Drs. Abd. Kholiq Ashari, Msi
3. Drs. Soeranto Soerantomo
4. Drs. R. K. Widjadi, SU

MENGETAHUI
DEKAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK



Drs. H. M. Toerki

KATA PENGANTAR

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah S.W.T, yang telah melimpahkan kasih karunia-Nya dan anugerah-Nya, penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.

Adapun judul skripsi ini adalah "Pengaruh pengawasan Langsung Pimpinan Terhadap Efektifitas Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Di kantor dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember". Tugas ini penulis selesaikan guna memenuhi salah satu syarat untuk menempuh ujian sarjana, pada Jurusan Ilmu Administrasi Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penulis menyadari, penyusunan skripsi ini adalah sebuah kerja berat yang tidak mungkin terselesaikan tanpa bantuan dan dorongan dari semua pihak. Hal ini dikarenakan adanya keterbatasan dari berbagai segi yang ada pada penulis. Oleh karena itu tiada kata yang lebih layak untuk menghormati selain ucapan terima kasih.

Tanpa mengurangi rasa hormat, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Drs. H. Moch. Toerki, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik beserta staf.
2. Bapak Drs. Mudhar syariffudin, Msi, selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
3. Bapak Drs. H. Boediono, Msi, selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
4. Bapak Drs. H. Humaidi, SU, Selaku Dosen Wali yang telah banyak membantu dalam proses belajar penulis.
5. Bapak Drs. Kholiq Ashari, Msi, selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Drs. Soeranto Soerantomo selaku Pembimbing II, yang telah

meluangkan waktu untuk membimbing, memberi petunjuk dan nasehat dalam penulisan skripsi ini.

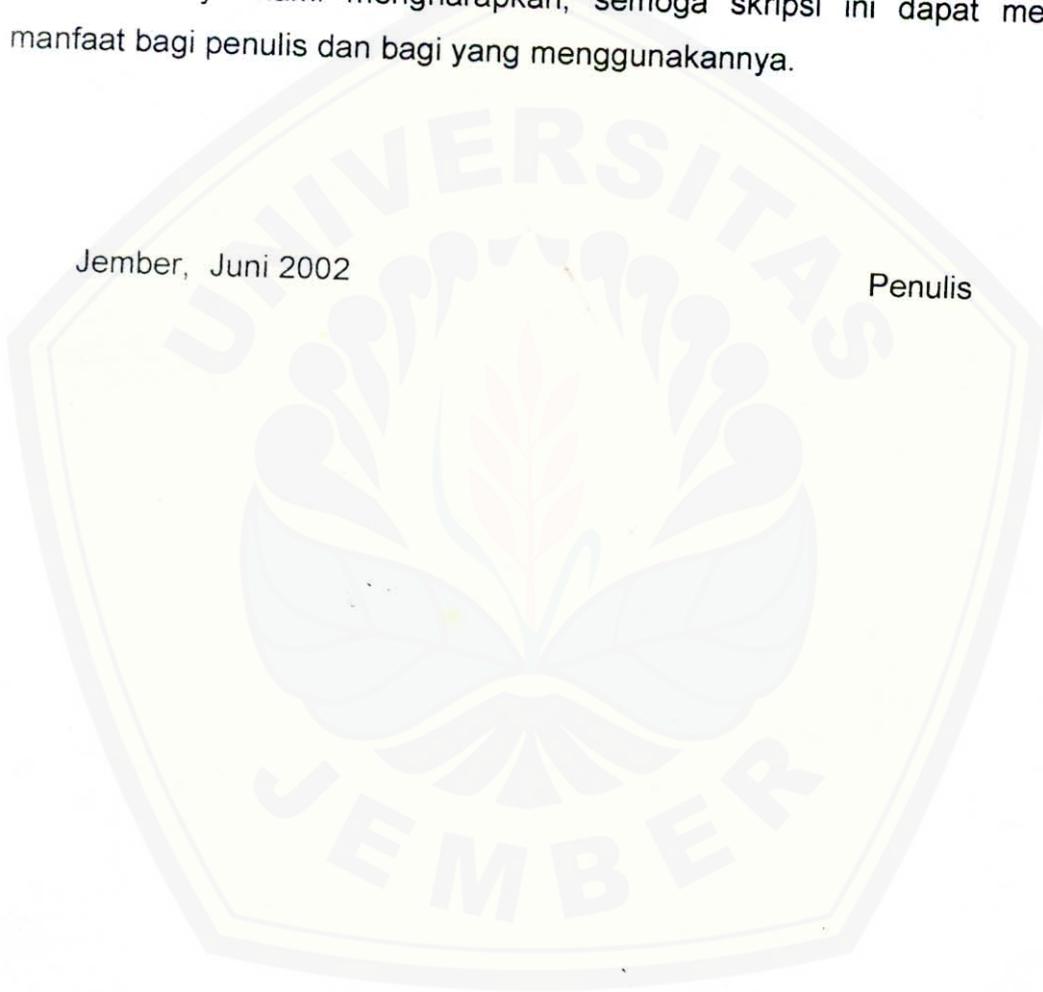
6. Bapak Drs. Rufa'i selaku Kepala Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember beserta Staf.

7. Segenap pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu kami dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Akhirnya kami mengharapkan, semoga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi penulis dan bagi yang menggunakannya.

Jember, Juni 2002

Penulis



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN MOTTO	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang masalah.....	1
1.2. Perumusan Masalah	13
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	14
1.3.1 Tujuan Penelitian	14
1.3.2 Kegunaan Penelitian.....	15
1.4. Kerangka Teori.....	15
1.4.1 Pendekatan Fungsi Manajemen	15
1.4.2 Pengertian dan Arti penting Pengawasan	16
1.4.3 pengertian Efektifitas	18
1.4.4 Pengaruh Pengawasan Terhadap efektifitas.....	19
1.5. Konsepsi Dasar.....	21
1.5.1 Konsep Pengawasan langsung Pimpinan.....	22
1.5.2 Konsep efektifitas	24
1.6. Hipotesis	26
1.7. Definisi Operasional	27
1.7.1 Operasionalisasi Variabel Pengaruh (X) yaitu Pengawasan Langsung Pimpinan.....	27

1.7.2	Operasionalisasi Variabel Terpengaruh (Y) yaitu Efektifitas Penerimaan Pendapatan Asli Daerah.....	29
1.8.	Metode Penelitian.....	31
1.8.1	Penentuan Populasi.....	31
1.8.2	Metode Penentuan Sampel	32
1.8.3	Metode Pengumpulan Data	32
1.8.4	Metode Analisa Data	34
II.	DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN.....	38
2.1.	Pengantar	38
2.2.	Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember	38
2.2.1	Kedudukan Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember	38
2.2.2	Tugas Pokok Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember	39
2.2.3	Fungsi Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember	39
2.2.4	Susunan Organisasi Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.....	39
2.2.5	Tata Kerja Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember	47
2.3.	Keadaan Pegawai	47
III.	PENYAJIAN DATA VARIABEL PENELITIAN	51
3.1.	Pengantar	51
3.2.	Operasionalisasi Variabel Pengaruh (X) Yaitu Pengawasan Langsung Pimpinan	51
3.2.1	Indikator Inspeksi Langsung Pimpinan	52
3.2.2	Indikator Pemeriksaan di Tempat	53

3.3. Operasionalisasi Variabel Terpengaruh (Y) Yaitu Efektifitas Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	57
3.3.1 Indikator Kualitas Kerja	57
3.3.2 Indikator Kuantitas Kerja	59
IV. ANALISA DAN INTERPRETASI DATA	64
4.1. Pengantar	64
4.2. Menganalisa dan Menginterpretasikan Data Tentang Pengaruh Pengawasan Langsung Pimpinan Terhadap Efektifitas Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jember	65
4.2.1 Memasukan Frekuensi Observasi Ke Dalam Tabel Persiapan.....	66
4.2.2 Menentukan db Untuk Menentukan Taraf Signifikansi	67
4.2.3 Menghitung X^2	68
4.2.4 Menentukan Signifikansi X^2 Observasi dengan Acuan Tabel Distribusi Chi Kuadrat	69
4.2.5 Analisis dan interpretasi Data Tentang Pengawasan Langsung Pimpinan Terhadap Efektifitas Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jember	69
V. KESIMPULAN DAN SARAN	74
5.1. Kesimpulan	74
5.2. Saran	74

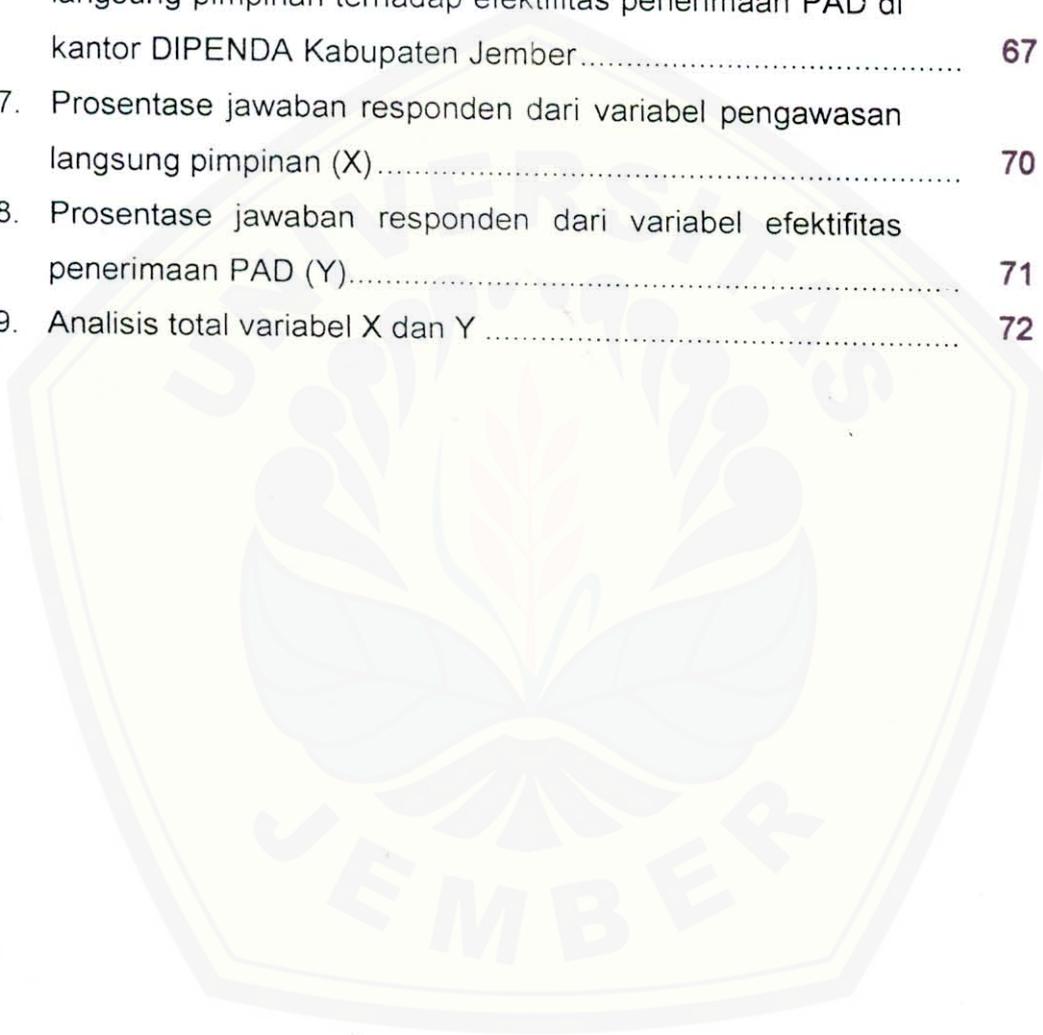
DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR.TABEL

TABEL	HAL
1. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2000	4
2. Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2001	6
3. Daftar kegiatan Pengawasan Langsung Pimpinan di Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2000/2001	12
4. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan	48
5. Jumlah Pegawai Berdasarkan Unit Kerja	48
6. Jumlah Pegawai Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan	49
7. Skor jawaban responden terhadap indikator Inspeksi Langsung pimpinan	53
8. Skor jawaban responden terhadap indikator pemeriksaan di tempat	55
9. Data skor jawaban responden terhadap Variabel pengaruh (X) yaitu Pengawasan langsung pimpinan	56
10. Frekuensi kategori jawaban responden terhadap tingkat pengawasan langsung pimpinan (X)	57
11. Skor jawaban responden terhadap indikator kualitas kerja	58
12. Skor jawaban responden terhadap indikator kuantitas kerja	59
13. Data skor jawaban responden terhadap Variabel Terpengaruh (Y) yaitu Efektifitas penerimaan Pendapatan Asli Daerah	61
14. Frekuensi kategori jawaban responden terhadap tingkat efektifitas penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Y)	62

15. Klasifikasi kategori jawaban responden tentang pengaruh pengawasan langsung pimpinan terhadap efektifitas penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Kantor Dinas pendapatan Daerah Kabupaten Jember	63
16. Tabel persiapan untuk mengetahui pengaruh pengawasan langsung pimpinan terhadap efektifitas penerimaan PAD di kantor DIPENDA Kabupaten Jember.....	67
17. Prosentase jawaban responden dari variabel pengawasan langsung pimpinan (X).....	70
18. Prosentase jawaban responden dari variabel efektifitas penerimaan PAD (Y).....	71
19. Analisis total variabel X dan Y	72



DAFTAR LAMPIRAN

1. Kuisisioner Penelitian
2. Surat Ijin Penelitian dari Lembaga Penelitian Penelitian UNEJ
3. Surat Ijin Penelitian dari Badan Kesatuan Bangsa dan LINMAS Kabupaten Jember
4. Surat Ijin Penelitian dari Kantor Dinas pendapatan Daerah Kabupaten Jember
5. Daftar Realisasi Penerimaan dan Tunggakan Pajak/Retribusi Tahun Anggaran 2000
6. Daftar Realisasi Penerimaan dan Tunggakan Pajak/Retribusi Tahun Anggaran 2001
7. Daftar Tabel Distribusi Chi Kuadrat



I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah, telah mencapai hasil yang cukup banyak. Hasil-hasil pembangunan itu tidak saja dibidang fisik-material, tetapi juga menyentuh bidang non-fisik dan bahkan bidang-bidang mental-spiritual. Di samping itu hasil-hasil yang telah dicapai tidak sekedar dinikmati oleh kelompok atau golongan tertentu di dalam masyarakat, tetapi juga oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

Pembangunan yang dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia merupakan tujuan dari pembangunan nasional Bangsa Indonesia. Tujuan pembangunan nasional Indonesia yaitu menciptakan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, mental dan spiritual sesuai dengan Ketetapan MPR-RI No.II/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN), yaitu:

Pembangunan Nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spirituil berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan yang aman, tenteram, tertib dan dinamis serta dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib dan damai.

Pembangunan-pembangunan yang telah dicapai tersebut tidak hanya dilaksanakan di pemerintah pusat saja tetapi juga dilaksanakan di pemerintah daerah. Untuk mendukung tercapainya pembangunan yang menyeluruh terutama di daerah, maka Pemerintah Republik Indonesia secara resmi menerapkan otonomi daerah dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Dengan berlakunya otonomi daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, Pemerintah

kabupaten memiliki kewenangan yang penuh terhadap seluruh aktivitas di bidang pemerintahan kecuali di bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter, fiskal, agama, serta kewenangan lainnya, seperti: kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengadilan, pembangunan nasional secara makro, dana perimbangan keuangan, sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia (SDM), pendayagunaan sumber daya alam (SDA) serta teknologi tinggi yang strategis, konversi dan standarisasi nasional.

Salah satu manfaat diberlakukannya otonomi daerah ialah akan terbentuknya suatu pemerintahan yang efektif dan efisien yang mampu mendukung globalisasi. Di samping itu, pemerintah daerah dapat mengidentifikasi potensi sumber-sumber pendapatannya, dan mampu menetapkan belanja daerah secara ekonomis, efisien dan efektif termasuk kemampuan perangkat daerah meningkatkan kinerja, mempertanggungjawabkan kepada pemerintah atasannya maupun publik.

Dengan adanya otonomi daerah ini, pemerintah kabupaten dapat mengatur rumah tangganya sendiri dengan memanfaatkan potensi sumber-sumber pendapatan yang ada. Salah satunya yaitu mengatur tentang keuangan daerah. Berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, pasal 79 sumber pendapatan Daerah terdiri atas: (a) pendapatan asli Daerah (b) dana perimbangan (c) pinjaman Daerah; dan (d) lain-lain pendapatan Daerah yang sah. Menurut pasal 79 ayat (a), pendapatan asli daerah terdiri : (1) hasil pajak daerah, (2) hasil retribusi daerah, (3) hasil perusahaan milik daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan (4) lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pengelola keuangan daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah yang merupakan salah satu dinas yang membantu pengelolaan rumah tangga daerah dalam bidang keuangan. Pendapatan asli daerah yang didapat dikelola oleh dinas pendapatan daerah untuk pembiayaan pembangunan daerah yang telah direncanakan. Dinas ini juga memegang

peranan penting karena secara tidak langsung berkaitan dengan sektor keuangan daerah yang turut mempengaruhi stabilitas roda pembangunan di wilayah yang bersangkutan.

Pemerintah daerah memiliki rencana pembangunan sekaligus rencana anggarannya, dan anggaran tersebut diperoleh dari pendapatan asli daerah dan subsidi keuangan dari pusat yang dikelola oleh dinas pendapatan daerah. Untuk menunjang pelaksanaan pembangunan yang direncanakan, dinas pendapatan daerah memiliki target pendapatan yang kemudian ditetapkan dalam target anggaran pembangunan tiap tahun. Target-target anggaran yang ditetapkan tersebut diberikan pada pos-pos pendapatan daerah sebagai pelaksana teknis.

Dengan adanya Undang-Undang Daerah Nomor 22 Tahun 1999, Kantor Dinas Pendapatan daerah Kabupaten Jember berusaha memenuhi target-target yang telah dianggarkan melalui pos-posnya. Pos-pos pendapatan daerah pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember meliputi pos pajak daerah, pos retribusi daerah, pos bag. perusahaan milik daerah, pos lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, pos dana bagi hasil pajak, pos bagi hasil bukan pajak sumber daya alam dan pos bag. lain yang sah. Pendapatan asli Daerah Kabupaten Jember pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah ini, digunakan untuk mendukung proses pelaksanaan pembangunan Kabupaten Jember.

Target-target pendapatan asli daerah yang telah direncanakan oleh Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember perlu ditingkat dari tahun-ketahun guna memenuhi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jember yang telah ditetapkan. Pemenuhan target-target pendapatan asli daerah tersebut memerlukan usaha yang keras sehingga hasil yang dicapai sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember terus berusaha meningkatkan

pendapatan asli daerah sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan, seperti terlihat pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2000 Tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2000

No	Jenis Pajak/Retribusi	Anggaran	Realisasi	%
1.	Pos Pajak Daerah	4.358.300.000,00	4.015.313.691,77	92,13
2.	Pos Retribusi Daerah	9.537.952.001,00	9.195.041.100,00	96,40
3.	Pos laba usaha daerah	2.267.138.167,84	2.262.638.167,84	99,80
4.	Pos lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	820.921.116,00	1.005.611.548,00	122,50
5.	Pos bagi hasil Pajak	9.334.000.000,00	15.837.475.928,73	169,68
6.	Pos Bukan Hasil Pajak	20.000.000,00	140.724.800,57	703,62
JUMLAH		26.338.311.284,84	32.456.805.236,91	123,23

Sumber: Data Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember 2000

Berdasarkan Tabel 1 di atas, terlihat bahwa target-target Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember pada tahun anggaran 2000 sebagai berikut : pos pajak daerah mencapai 92,13%, pos retribusi daerah mencapai 96,40%, pos laba usaha daerah mencapai 99,80%, pos lain-lain pendapatan asli daerah yang sah mencapai 122,50%, pos bagi hasil pajak mencapai 169,68% dan pos bagi hasil bukan pajak mencapai 703,62%. Prosentase realisasi Secara umum dari target yang dianggarkan sebesar 123,23%. Berdasarkan hal di atas, jelas terlihat bahwa Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember telah berhasil mencapai target Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jember dari

target APBD Kabupaten Jember Tahun 2000 yang telah dianggarkan, Namun pada beberapa pos terdapat pos yang belum memenuhi target anggaran, sehingga dapat dikatakan bahwa belum efektifnya pencapaian target anggaran 2000 ini.

Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jember Tahun 2001, pos Pendapatan Asli Daerah Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember dianggarkan sebesar 45.697.646.000,00, sedangkan pada anggaran APBD Kabupaten Jember tahun anggaran 2000 sebesar 26.338.311.284,84. Dengan adanya kenaikan target anggaran pada pos pendapatan asli daerah, Kantor Dinas Pendapatan Kabupaten Jember diharapkan dapat memenuhi target anggaran yang telah ditentukan tersebut dibanding dengan pencapaian target tahun anggaran sebelumnya.

Dalam mencapai APBD Kabupaten Jember Tahun 2001, diperlukan usaha yang lebih efektif dari Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember agar semua pos dapat memenuhi target yang telah ditentukan. Perolehan Pendapatan Asli daerah Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember pada APBD 2001 Kabupaten Jember dapat dilihat pada Tabel 2 di bawah ini.

Tabel 2. Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2001

No	Jenis Pajak/Retribusi	Anggaran	Realisasi s/d bulan ini	%
1.	Pos Pajak Daerah	6.670.000.000,00	7.161.839.625,92	107,37
2.	Pos Retribusi Daerah	13.546.596.000,00	14.086.000.808,57	103,98
3.	Pos Bag. Perusahaan milik daerah	2.318.050.000,00	2.324.400.000,00	100,27
4.	Pos lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	593.000.000,00	2.897.200.134,05	488,57
5.	Pos bagi hasil Pajak	20.470.000.000,00	22.499.514.943,00	109,92
6.	Pos Bukan Hasil Pajak Sumber Daya Alam	100.000.000,00	1.207.142.306,84	1.207,14
7.	Pos bag. Lain Penerimaan Yang Sah	2.000.000.000,00	4.002.352.192,18	200,12
JUMLAH		45.697.646.000,00	54.178.450.010,56	118,56

Sumber: Data Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember 2001

Berdasarkan Tabel 2 di atas, Pendapatan Asli daerah di Kantor Pendapatan Daerah Kabupaten Jember mencapai 118,56% dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD Kabupaten Jember Tahun 2001. Dan setiap pos pada tahun anggaran 2001 rata-rata memenuhi target sebesar 100%, pos pajak daerah mencapai 107,37%, pos retribusi daerah mencapai 103,98%, pos bagian perusahaan milik daerah mencapai 100,27%, pos lain-lain pendapatan asli daerah yang sah mencapai 488,57%, pos bagi hasil pajak mencapai 109,92%, pos bagi hasil bukan pajak sumber daya alam mencapai 1.207,14% dan pos bagi hasil lain penerimaan yang sah mencapai 200,12%. Hal ini berarti Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember secara efektif telah mencapai target yang telah ditentukan.

Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember sebagai suatu organisasi, diharapkan untuk terus meningkatkan kerja sama seluruh anggotanya dalam pelaksanaan tugas pekerjaan guna pencapaian target Pendapatan Asli Daerah yang telah ditetapkan, sesuai dengan pendapat

Sarwoto (1991:105) yang menyatakan bahwa "organisasi diartikan sebagai wadah suatu proses kerja sama, sejumlah manusia yang terikat dalam rangkaian hirarki untuk mencapai tujuan bersama".

Untuk menjamin agar kerja sama dalam organisasi tersebut tidak menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan bersama dan agar aktivitas dapat berjalan dengan lancar perlu pemimpin, sesuai pendapat Ralph Currier Davis (Sutarto, 1995:24) bahwa "organisasi adalah suatu kelompok orang-orang yang sedang bekerja kearah tujuan bersama di bawah kepemimpinan".

Pemimpin mempunyai tanggung jawab yang besar dalam mengarahkan dan mengatur aktivitas para bawahan untuk mencapai keberhasilan tujuan organisasi. Jadi dapat dikatakan bahwa keberhasilan organisasi ditentukan oleh bagaimana seorang pemimpin mampu memimpin para bawahannya.

Aktivitas organisasi yang dipimpin oleh seorang pemimpin dalam mencapai tujuan organisasi menggunakan cara-cara tertentu sehingga pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dapat berjalan dengan efektif, sesuai dengan hal tersebut The Liang Gie (1981:7) menyatakan bahwa :

Efektifitas adalah suatu keadaan yang mengandung pengertian terjadinya efek atau akibat yang dikehendaki. Kalau seseorang melakukan kegiatan dengan tujuan tertentu yang memang dikehendaki, maka perbuatan orang itu dikatakan efektif, kalau menimbulkan sesuatu akibat atau maksud sebagaimana yang dikehendaki.

Seperti diuraikan di atas maka untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif itu diperlukan cara-cara tertentu oleh pimpinan organisasi. Dalam organisasi cara-cara tersebut dikenal dengan fungsi-fungsi manajemen. Menurut Sondang P. Siagian (1992:44) bahwa "fungsi manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pengawasan dan penilaian merupakan keseluruhan fungsi utama yang

mutlak perlu dilakukan oleh para manajer dalam rangka pencapaian tujuan dan berbagai sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya”.

Selanjutnya fungsi-fungsi manajemen tersebut adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan

Perencanaan merupakan salah satu fungsi utama yang harus dilakukan oleh suatu organisasi karena perencanaan merupakan kesatuan tindakan untuk mempersiapkan tindakan selanjutnya. Perencanaan menurut Siagian (1992:50) adalah “usaha sadar dan pengambilan keputusan yang telah diperhitungkan secara matang tentang hal-hal yang akan dikerjakan di masa depan dalam dan oleh suatu organisasi dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya”.

Dalam suatu perencanaan dibutuhkan kemampuan untuk meramal dan menjabarkan situasi yang akan dihadapi dalam melaksanakan tugas baik hambatan maupun kendalanya. Sehingga butuh perumusan yang cermat yang pada akhirnya bermuara pada perencanaan yang baik dan menjamin efektifitas pelaksanaan tugas.

2. Pengorganisasian

Pengorganisasian menurut Siagian (1992 : 81) adalah

Pengorganisasian yaitu keseluruhan proses pengelompokan orang-orang, alat-alat, tugas-tugas, serta wewenang dan tanggung jawab sedemikian rupa sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat digerakan sebagai suatu kesatuan yang utuh dan bulat dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Suatu rencana yang telah dirumuskan dan ditetapkan sebagai hasil penyelenggaraan fungsi perencanaan, dilaksanakan oleh sekelompok orang yang tergabung dalam satuan-satuan kerja tertentu. Satuan-satuan kerja tersebut merupakan bagian dari organisasi. Karena berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan – baik yang berwujud tugas pokok maupun tugas

penunjang – harus diusahakan agar terlaksana dengan efisien, efektif dan produktif dalam wadah yang sesuai dengan kebutuhan.

3. Penggerakan

Penggerakan menurut Siagian (1992:128) adalah "keseluruhan usaha, cara teknik dan metode untuk mendorong para anggota organisasi agar mau dan ikhlas bekerja dengan sebaik mungkin demi tercapainya tujuan organisasi dengan efisien, efektif dan ekonomis".

Dalam suatu organisasi, para manajer berusaha memberikan dorongan kepada para bawahan sedemikian rupa sehingga kemampuan yang secara intrinsik yang terdapat dalam diri bawahan itu digabung dengan dorongan dari luar dirinya, diharapkan mengakibatkan para bawahan secara ikhlas memberikan yang terbaik dalam dirinya berdasarkan pengalaman dan pemanfaatan waktu sedemikian rupa sehingga tujuan dan berbagai sasaran tercapai.

4. Pengawasan

Menurut Siagian (1992:169) "Pengawasan adalah proses pengamatan dari seluruh kegiatan organisasi guna lebih menjamin bahwa semua pekerjaan yang sedang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya".

Fungsi pengawasan ini adalah untuk mencegah terjadinya penyelewengan dan penyimpangan dalam pelaksanaan perencanaan yang telah ditentukan, dengan adanya pengawasan maka perencanaan yang telah ditetapkan akan berjalan tanpa adanya penyelewengan dan penyimpangan.

5. Penilaian

Menurut Siagian (1992:206) "penilaian adalah pengukuran dan perbandingan hasil-hasil yang nyatanya dicapai dengan hasil-hasil yang seharusnya dicapai".

Dari penjelasan di atas, penulis dalam penelitian ini membatasi pembahasan pada fungsi pengawasan. Pengawasan bukanlah satu-satunya faktor yang mempengaruhi efektifitas kerja pegawai tetapi merupakan salah satu faktor dari beberapa faktor yang lainnya. Maka dalam hal ini penulis membatasi pada pengawasan dengan "menceterisparibuskan" faktor-faktor lainnya, sesuai pendapat Hatta (1970:6) sebagai berikut :

Bahwa hal-hal lain yang menjadi sebab itu sementara tidak berubah dan hal yang lain tidak mengganggu kedudukan keadaan itu, sebab kalau hal-hal yang menjadi berubah, sudah barang tentu berubah pula jadinya. Sebab ilmu di dalam keterangannya senantiasa mengemukakan syarat-syarat yang selainnya tidak berubah, syarat-syarat ini biasa disebut dengan perkataan "Ceteris Paribus".

Penulis membatasi pembahasan dalam penelitian ini pada unsur pengawasan karena pengawasan itu sangat penting untuk pencapaian rencana yang telah ditetapkan sebelumnya dalam suatu organisasi. Seperti yang dikemukakan Musanef (1991:204) yaitu

Dalam organisasi terutama organisasi pemerintahan, fungsi pengawasan adalah sangat penting karena pengawasan itu adalah suatu usaha menjamin adanya kesesuaian antara penyelenggaraan tugas pemerintahan oleh daerah dan oleh pemerintah dan untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna.

Sehingga dengan adanya fungsi pengawasan diharapkan adanya kesesuaian dan keserasian dalam penyelenggaraan pemerintahan agar tercapai secara berhasil guna dan berdaya guna.

Dari pengertian di atas, terlihat bahwa fungsi pengawasan mempunyai manfaat yang penting bagi pelaksanaan tugas pekerjaan dan pencapaian tujuan organisasi. Manfaat fungsi pengawasan ini sesuai dengan pendapat yang diungkapkan oleh Manullang (1985:173) bahwa :

1. Agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan intruksi yang dikehendaki
2. Untuk mengetahui kelemahan-kelemahan serta kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam pelaksanaan.

3. Mengadakan tindakan perbaikan baik pada waktu itu atau waktu yang akan datang terhadap kelemahan-kelemahan yang ditemukan.

Dengan adanya fungsi pengawasan diharapkan adanya kesesuaian dan keserasian dalam penyelenggaraan pemerintahan agar tercapai secara berhasil guna dan berdaya guna.

Pada tahun anggaran 2001, pelaksanaan fungsi pengawasan di Kantor Dinas pendapatan Daerah Kabupaten Jember, berdasarkan pada Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980 Tentang Pedoman Pelaksanaan Disiplin, pengawasan langsung pimpinan dalam prakteknya berbentuk pengawasan melekat. Pengawasan Melekat menurut Nawawi (1989:7) yaitu

- Pengawasan melekat sebagai salah satu kegiatan pengawasan merupakan tugas dan tanggung jawab setiap pimpinan yang harus menyelenggarakan manajemen/administrasi yang efektif dan efisien di lingkungan organisasi/unit kerja masing-masing baik dibidang pemerintahan maupun swasta.

Pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, pelaksanaan pengawasan dilakukan setiap 6 kali dalam satu minggu berarti dalam satu bulan dilaksanakan 24 kali pengawasan pada masing-masing bagian. Realisasi pelaksanaan pengawasan langsung pimpinan di Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember dapat dilihat pada Tabel 3 berikut ini.

Tabel 3. Daftar kegiatan Pengawasan Langsung Pimpinan di Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2000/2001

Pengawasan Yang Dilakukan Pimpinan				
No.	Bagian	Frekuensi	Realisasi	%
1.	Tata Usaha	288	250	86,8
2.	Sub Dinas Program	288	244	84,7
3.	Sub Dinas pendapatan dan	288	255	88,5
4.	Pendaftaran	288	255	88,5
5.	Sub Dinas Penagihan	288	252	87,5
	Sub Dinas Retribusi dan Pendapatan			
6.	Lain-lain	288	239	82,9
	Sub Dinas Bagi Hasil Pendapatan			
RATA-RATA				86,5

Sumber : Data Sekunder Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember Tahun 2001 (diolah)

Menurut pedoman waskat (CV. Kloeng Klede Jaya, Jakarta, 1991), pengawasan melekat dilaksanakan 2 kali dalam 1 minggu diperoleh kategori :

- 0 – 40 % : Kategori rendah
- 41 – 80 % : Kategori sedang
- 81 – 100 % : Kategori tinggi ✓

Berdasarkan kategori tersebut, maka pengawasan langsung yang dilakukan oleh pimpinan di Kantor Dinas pendapatan Daerah kabupaten Jember pada Tahun Anggaran 2000-2001, tergolong pada kategori tinggi dengan prosentasi 86,5%.

Tingginya tingkat pengawasan langsung pimpinan yang dilakukan di Kantor Dinas Pendapatan Daerah kabupaten Jember pada tahun anggaran 2000/2001, menghasilkan secara efektif pencapaian target pendapatan asli daerah seperti telah diuraikan sebelumnya.

Berdasarkan hal di atas, penulis memfokuskan penelitian pada pengawasan langsung yang dilakukan oleh pimpinan. Seperti yang dikemukakan oleh Sujamto (1986:76) pengawasan langsung adalah "Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan dengan cara mendatangi dan melakukan pemeriksaan ditempat (on The Spot) terhadap objek yang diawasi."

Pengawasan langsung pimpinan akan mencegah terjadinya penyelewengan dan hal itu akan meningkatkan upaya pencapaian target secara optimal. Dengan adanya pengawasan langsung pimpinan diharapkan akan muncul sikap disiplin, kesatuan tindakan, keselarasan aktifitas dan ketepatan waktu dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan sehingga target pelaksanaan tugas tercapai.

Dari uraian tersebut di atas akhirnya penulis tertarik untuk mengambil judul penelitian tentang **"Pengaruh Pengawasan Langsung Pimpinan Terhadap Efektifitas Penerimaan Asli Daerah (PAD) Di Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember."**

1.2. Perumusan Masalah

Menurut Nawawi (1992:24) "Masalah sosial merupakan kondisi yang menunjukkan kesenjangan (gap) antara peristiwa atau keadaan nyata (das sain) dengan tolak ukur tertentu (das sollen) sebagai kondisi ideal atau seharusnya bagi peristiwa atau keadaan tertentu itu".

Lebih lanjut A.A. Loedin (1976:11) mengemukakan syarat-syarat untuk merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Menunjukkan adanya hubungan dua variabel atau lebih
2. Persoalan harus ditegaskan dalam bahasa yang jelas dan mudah dituangkan dalam kalimat tanya
3. Persoalan harus memungkinkan pengukuran secara empiris

Ndraha (1988:9) mendefinisikan perumusan masalah adalah “usaha untuk merumuskan segala masalah yang telah diidentifikasi dan ditimbang bobot dan unsur-unsurnya. Kedudukannya pada proporsi tertentu menentukan batas-batas hubungannya dengan masalah lain dan mengidentifikasi aspek-aspek serta unsur-unsurnya”.

Bertolak dari uraian di atas tersebut, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Apakah ada Pengaruh Pengawasan Langsung Pimpinan Terhadap Efektifitas Penerimaan Asli Daerah (PAD) Di Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.”

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Pelaksanaan kegiatan yang dilakukan dalam menjalankan tugas pekerjaan dilaksanakan secara sistematis guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan dapat diketahui secara sejelas-jelasnya.

Seperti yang dikemukakan oleh Hadi (1989:3) bahwa suatu penelitian khususnya dalam bidang ilmu pengetahuan empiris pada umumnya bertujuan untuk menemukan, membagikan atau menguji kebenaran suatu pengetahuan.

Berdasarkan uraian di atas, penulis menentukan tujuan secara umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah Pengaruh Pengawasan Langsung Pimpinan Terhadap Efektifitas Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

1.3.2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah :

1. Diharapkan dari penelitian dapat memberikan sumbangan bagi Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
2. Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat sebagai salah satu sumbangan penulis untuk penelitian selanjutnya, khususnya yang berkaitan dengan Fungsi-fungsi manajemen, terutama tentang fungsi pengawasan.

1.4 Kerangka Teori

1.4.1. Pendekatan Fungsi Manajemen

Cara pengelolaan sebuah organisasi berubah menurut pengelolaan organisasi tersebut memerlukan suatu cara atau rancangan untuk membentuk suatu organisasi yang dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Penerapan prinsip-prinsip manajemen, program-program dan teknik berorganisasi harus semakin diefektifkan. Sedangkan yang dimaksud manajemen menurut Gibson, Donelly dan Ivancevich (1996:4) adalah "manajemen adalah proses yang dilakukan oleh satu atau lebih individu untuk mengkoordinasikan berbagai aktivitas lain untuk mencapai hasil-hasil yang tidak bisa dicapai apabila suatu individu bertindak sendiri"

Dalam pelaksanaan proses manajemen tersebut, agar pencapaian tujuan organisasi dapat tercapai diperlukan cara-cara yang lebih efektif dan efisien dalam pengelolaan organisasi. Cara-cara ini dalam ilmu manajemen dikenal dengan fungsi-fungsi manajemen.

Fungsi-fungsi manajemen tersebut sangat mempengaruhi berjalannya pelaksanaan tugas pekerjaan bawahan. Fungsi-fungsi manajemen merupakan faktor yang mempengaruhi efektifitas pelaksanaan tugas pegawai, seperti yang dijelaskan lebih lanjut oleh Siagian (1992:44) bahwa "fungsi manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pengawasan dan penilaian merupakan keseluruhan fungsi utama yang mutlak perlu dilakukan oleh para manajer dalam rangka pencapaian tujuan dan berbagai sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya".

Seperti uraian di atas fungsi pengawasan sangat menentukan dan mempengaruhi efektifitas pelaksanaan tugas pegawai dalam mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan sebelumnya, seperti yang diungkapkan Handoko (1997:359) bahwa "pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan organisasi dan manajemen tercapai".

1.4.2. Pengertian dan Arti Penting Pengawasan

Perencanaan dalam suatu organisasi merupakan langkah awal dalam pencapaian tujuan organisasi. Namun, dalam pelaksanaannya banyak sekali tugas-tugas dan pekerjaan-pekerjaan yang telah direncanakan tidak dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan, sehingga banyak sekali penyimpangan-penyimpangan dan penyelewengan-penyelewengan dari tugas dan pekerjaan tersebut. Untuk menghindari terjadinya hal seperti itu, maka penting sekali perlunya suatu pengawasan yang mengawasi segala pekerjaan, tugas, kewajiban para pegawai.

Pengawasan yang dilakukan dapat dikatakan sebagai rangkaian aktifitas untuk menemukan dan mengoreksi penyimpangan-penyimpangan dalam kegiatan-kegiatan yang direncanakan. Winardi (1989:379) mengemukakan bahwa pengawasan berarti : "mendeterminasi apa yang telah dilaksanakan, maksudnya mengevaluasi prestasi kerja dan atau bila perlu menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana-rencana".

Pelaksanaan proses pengawasan dibedakan menjadi dua macam yaitu pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung. Menurut Siagian (1992:139) bahwa :

pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan dengan cara mendatangi dan melakukan pemeriksaan di tempat terhadap obyek yang diawasi. Pelaksanaanya dapat berbentuk inspeksi langsung, observasi di tempat (on the spot observation). Sedangkan yang dimaksud dengan pengawasan tidak langsung adalah pengawasan yang dilakukan dari jarak jauh, yaitu melalui laporan yang berbentuk lisan maupun tulisan.

Pengawasan langsung itu sendiri menurut Sujamto (1986:76) adalah

Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan dengan cara mendatangi dan melakukan pemeriksaan ditempat (on The Spot) terhadap objek yang diawasi. Dan pelaksanaannya dapat berbentuk inspeksi langsung dan pemeriksaan ditempat.

Mengenai uraian di atas ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan pengawasannya, seorang pimpinan atau atasan melakukan sendiri tugas pengawasan tersebut terhadap pekerjaan dan hasil kerja bawahannya sehingga pimpinan dapat mengetahui sejauh mana hasil kerja bawahannya dan mengambil suatu tindakan selanjutnya untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang, tugas dan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan, agar tujuan

organisasi dapat tercapai. Pengertian pengawasan langsung ini menunjukkan bahwa fungsi pengawasan dalam suatu organisasi merupakan salah satu faktor fungsi manajemen yang penting dalam mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan selain itu fungsi pengawasan mempunyai manfaat yang tertentu bagi organisasi seperti dikatakan Manullang (1985:173) bahwa :

1. Agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan intruksi yang dikehendaki
2. Untuk mengetahui kelemahan-kelemahan serta kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam pelaksanaan.
3. Mengadakan tindakan perbaikan baik pada waktu itu atau waktu yang akan datang terhadap kelemahan-kelemahan yang ditemukan.

1.4.3. Pengertian efektifitas

Fungsi-fungsi manajemen yang dipergunakan dalam suatu organisasi oleh pimpinan atau atasan memiliki tujuan agar tindakan-tindakan yang dilakukan dalam pelaksanaan tugas dan pekerjaan dapat dilakukan secara efektif sehingga tercapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dalam mencapai efektifitas pelaksanaan tugas, penulis mendasarkan diri pada pendapat Wilson dan Heyel (1972:102) tentang efektifitas pelaksanaan tugas yaitu, "Efektifitas sebenarnya terdiri dari dua bagian besar yaitu kualitas kerja (Quality of work, dependability, attitude) dan kuantitas kerja (Quantity of work)". Berdasarkan pendapat di atas, dalam pencapaian efektifitas pelaksanaan tugas oleh pegawai, pencapaian kualitas kerja dan kuantitas kerja haruslah seimbang. Hal ini disebabkan antara kualitas kerja dengan kuantitas kerja merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya.

Pendapat lain yang menyatakan pencapaian efektifitas organisasi dalam tugas dan pekerjaan yang dilakukan menurut Lubis dan Husein (1987:55) antara lain :

Pendekatan sasaran (GOAL APPROACH) dalam pengukuran efektifitas memuaskan perhatiannya pada aspek output yaitu mengukur keberhasilan organisasi dalam mencapai tingkatan output yang direncanakan. Pendekatan sumber (Sistem Resources Approach) mencoba mengukur efektifitas dari sisi input yaitu dengan mengukur keberhasilan organisasi dalam mendapatkan sumber-sumber yang dibutuhkan untuk mencapai performansi yang baik. Pendekatan proses (Process Approach) melihat kegiatan internal organisasi dan mengukur melalui berbagai kegiatan internal seperti efisiensi dan iklim organisasi.

Sedangkan efektivitas menurut Emerson (dalam Handayaniingrat 1985:16) adalah sebagai berikut "Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah dicapai sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya. Jelasnya bila sasaran atau tujuan yang telah tercapai sesuai dengan yang telah direncanakan berarti efektif".

Pada hakekatnya terjadinya efektivitas adalah dilihat dari pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dan dalam organisasi tercapainya tujuan ini ditentukan melalui kerjasama orang-orang yang terlibat di dalamnya.

1.4.4. Pengaruh pengawasan terhadap efektivitas

Fungsi pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan atau atasan adalah untuk mengetahui setiap kegiatan berjalan secara efektif dalam mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Sarwoto (1991:94) menyatakan "pengawasan adalah kegiatan manajer yang mengusahakan agar pekerjaan yang terlaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan atau hasil yang dikehendaki".

Dari uraian tersebut terlihat fungsi pengawasan sangat penting dalam proses manajemen untuk mencapai efektifitas pelaksanaan tugas-tugas atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Robert J. Mockler (dalam Handoko 1997:361) mengatakan bahwa

Pengawasan manajemen adalah suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan dipergunakan dengan cara paling efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan perusahaan.

Adapun hubungan pengawasan langsung dengan efektifitas berdasarkan uraian di atas, pengawasan langsung oleh pimpinan merupakan suatu proses, dimana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil-hasil pekerjaan yang dilaksanakan oleh bawahannya sesuai dengan rencana yang telah ditentukan, dan dapat mengambil tindakan korektif yang diperlukan terhadap penyimpangan tugas pekerjaan sehingga dapat tercapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien.

Penjelasan lain mengenai hubungan antara pengawasan langsung dengan efektifitas diterangkan oleh Hasibuan (1987:228) menyatakan bahwa:

pengawasan yang dilakukan secara langsung oleh pimpinan secara pribadi, ia memeriksa pekerjaan-pekerjaan yang sedang dilakukan untuk mengetahui apakah hasil-hasilnya sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya.

Dari Penjelasan di atas jelas bahwa pengawasan langsung pimpinan sangat berpengaruh terhadap efektifitas pelaksanaan pekerjaan bawahan dalam hal ini hasil-hasil yang telah dicapai sesuai dengan yang telah ditentukan. Pimpinan dapat melihat dan mengambil tindakan apabila terjadi hambatan dan penyelewengan dalam pelaksanaan pekerjaan bawahan, sehingga terjadi perbaikan-perbaikan pelaksanaan pekerjaan dimasa yang akan datang serta pencapaian

tujuan pekerjaan dapat berjalan dengan efektif. Hal ini sesuai dengan pendapat Sujamto (1986:83) sebagai berikut

Tujuan diadakan pengawasan untuk mengetahui dan memahami kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan kegiatan/pekerjaan yang menjadi objek pengawasan, sesuai dengan semestinya atau tidak sebagai bahan untuk melakukan perbaikan-perbaikan dimasa yang akan datang.

1.5. Konsepsi Dasar

Dalam kegiatan penelitian dari awal sampai akhir digunakan kerangka yang utuh dalam pencapaian jawaban atas persoalan-persoalan yang dilontarkan dalam bentuk perumusan masalah. Perumusan masalah yang ada perlu dibahas secara cermat dan teliti agar tercapai jawaban-jawaban yang tepat, untuk tercapainya jawaban tersebut diperlukan suatu konsep atau teori yang jelas dan benar. Singarimbun dan Effendy (1989:37) menyatakan bahwa

Teori adalah serangkaian asumsi, konsep, konstruk, definisi dan preposisi, untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan merumuskan hubungan antar konsep. Dapat disimpulkan bahwa teori adalah serangkaian konsep atau tujuan untuk memberikan jawaban secara sistematis tentang gejala-gejala yang diteliti.

Pengertian konsepsi Dasar menurut Supranto (1988:10) adalah

Konsepsi dasar adalah suatu pandangan yang teoritis dari definisi singkat yang mendasari pemikiran kita guna mencapai jalan keluarnya atau suatu pemecahan dari persoalan yang perlu diselidiki. Tujuan adalah untuk menyederhanakan pemikiran kita dengan jalan menggabungkan sekumpulan peristiwa atau gejala.

Konsepsi dasar memberikan kerangka berfikir yang kuat dalam menjawab dan memecahkan masalah ataupun persoalan yang ada. Berkaitan dengan pemecahan masalah yang dihadapi, maka konsep yang penulis ajukan sebagai berikut :

1. Konsep pengawasan langsung pimpinan (dari variabel X)
2. Konsep Efektifitas (dari variabel Y)

1.5.1. Konsep Pengawasan Langsung Pimpinan

Dalam suatu organisasi, pencapaian tujuan organisasi merupakan hal yang sangat penting, untuk itu diperlukan tindakan yang mendukung tujuan tersebut sehingga tindakan-tindakan itu dapat berjalan dengan efektif. Tindakan-tindakan tersebut dalam organisasi disebut fungsi-fungsi manajemen yang berupa perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pengawasan dan penilaian seperti yang dikemukakan oleh Sondang P. Siagian (1992:44) bahwa "fungsi manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pengawasan dan penilaian merupakan keseluruhan fungsi utama yang mutlak perlu dilakukan oleh para manajer dalam rangka pencapaian tujuan dan berbagai sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya".

Salah satu fungsi manajemen yang mendukung pencapaian tujuan organisasi tersebut adalah fungsi pengawasan. Pengawasan ini dilakukan oleh individu yang menduduki jabatan manajerial, mulai dari pimpinan puncak (top manager) sampai pimpinan rendah (low manager) yang secara langsung mengendalikan kegiatan-kegiatan teknis yang diselenggarakan oleh semua petugas operasional.

Hal ini sesuai dengan pendapat Mc. Farlan (1988:14) yang menyatakan bahwa, "Bahwa pimpinan adalah suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, perintah, tujuan atau kebijakan yang telah ditentukan".

Fungsi pengawasan dalam menjalankan pengawasan pada suatu organisasi secara tehnik dan langsung dilakukan oleh pimpinan disebut pengawasan langsung. Pengawasan langsung pimpinan ini

dimaksudkan agar semua aktivitas kerja bawahan dapat diawasi langsung pimpinan sehingga pimpinan dapat mengambil tindakan-tindakan yang berguna dalam mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan dan penyelewengan-penyelewengan dari ketentuan yang ada. Pengawasan langsung pimpinan dalam mengawasi setiap tindakan bawahannya melalui proses atau tindakan-tindakan inspeksi langsung dan pemeriksaan ditempat seperti pendapat Sujamto (1986:76) adalah

Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan dengan cara mendatangi dan melakukan pemeriksaan ditempat (on The Spot) terhadap objek yang diawasi. Dan pelaksanaannya dapat berbentuk inspeksi langsung dan pemeriksaan ditempat.

Dari pengertian pengawasan langsung di atas dapat dilihat cara yang dilakukan oleh pimpinan dalam melaksanakan pengawasan langsung dan menjadi kajian dalam penelitian ini, yaitu :

- Inspeksi langsung
- Pemeriksaan di tempat

A. Inspeksi Langsung

Tindakan pengawasan dimaksudkan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan penyelewengan yang biasanya dilakukan oleh pegawai, sehingga pelaksanaan pekerjaan menjadi terhambat dan tujuan organisasi tidak dapat tercapai secara maksimal. Seorang pimpinan diharapkan dapat mengetahui secara langsung pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawainya sehingga adanya kesulitan atau kelemahan dapat diidentifikasi untuk kemudian dapat diambil tindakan perbaikan, yang dimaksud dengan inspeksi langsung menurut Sujamto (1986:76) sebagai berikut : "Inspeksi langsung adalah kegiatan yang langsung ditempat pelaksanaan tugas pekerjaan, baik yang dilakukan oleh pimpinan (manajer) yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan maupun oleh petugas pengawasan."

B. Pemeriksaan ditempat

Soejamto (1986:123) menjelaskan pengertian pemeriksaan ditempat sebagai berikut

Pemeriksaan adalah segala sesuatu atau kegiatan dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan melalui pengamatan, pencatatan atau rekaman, penyelidikan dan penelaahan secara cermat dan sistematis serta melalui penilaian dan pengujian terhadap segala informasi yang dikaitkan dengan objek yang diperiksa dan menuangkan hasilnya dalam berita acara pemeriksaan.

Dari uraian tersebut, pimpinan melakukan pemeriksaan terhadap informasi yang berkaitan dengan objek yang diperiksa melalui pengamatan, pencatatan atau perekaman, penyelidikan dan penelaahan secara cermat dan sistematis. Sehingga pelaksanaan tugas dan pekerjaan bawahan dapat berjalan dengan baik.

1.5.2. Konsep Efektifitas

Penulis mencoba mengukur efektifitas organisasi, sesuai dengan konsep yang dikatakan Wilson dan Heyel (1972:102) bahwa: "efektifitas sebenarnya terdiri dari dua bagian, yaitu kualitas kerja (quality of work) dan kuantitas kerja (quantity of work)". Efektifitas yang menjadi kajian dalam penelitian ini adalah efektifitas organisasi, maka untuk penjelasan konsep tersebut digunakan pendekatan tujuan (the goal approach). Mengacu pendapat James I. Gibson (1996:27) bahwa: "pendekatan tujuan untuk menentukan dan mengevaluasi efektifitas didasarkan pada sasaran bahwa organisasi diciptakan sebagai alat untuk mencapai tujuan".

Untuk Mengukur tugas yang dilaksanakan oleh pegawai itu efektif atau tidak, perlu dicari lebih dahulu dimensi-dimensi yang ada di dalam efektifitas yang akan dijadikan patokan untuk mengukur atau mengevaluasi pencapaian tujuan yang telah ditentukan.

Untuk mengukur efektifitas pelaksanaan tugas penulis mendasarkan diri pada pendapat Wilson dan Heyel (1972:102) tentang efektifitas pelaksanaan tugas yaitu, "Efektifitas sebenarnya terdiri dari dua bagian besar yaitu kualitas kerja (Quality of work, dependability, attitude) dan kuantitas kerja (Quantity of work)".

Jadi pembahasan mengenai efektifitas ini, penulis menggunakan ukuran :

- a. Kuantitas kerja
- b. Kualitas kerja

A. Kualitas Kerja

Menurut Wilson dan Heyel (1972:101) kualitas kerja adalah "hal-hal yang menunjukkan bagaimana sebaiknya ia melakukan apa yang dikerjakan, ketepatan, kelengkapan dan kerapian".

Pada aspek kualitas ini lebih memfokuskan pada suatu pekerjaan yang dilaksanakan dengan memperhatikan ketepatan, kelengkapan dan kerapian. Apabila pekerjaan dikerjakan secara tepat, lengkap dan rapi maka akan muncul rasa puas bagi pegawai dan organisasi sehingga memacu pencapaian tujuan organisasi.

B. Kuantitas kerja

Selain memperhatikan kualitas suatu pekerjaan organisasi, juga harus memperhatikan pada kuantitas kerja. Kualitas dan kuantitas kerja harus seimbang karena dua hal ini saling berkaitan.

Wilson dan Heyel (1972:101) mengatakan definisi tentang kuantitas yaitu, "hal-hal yang menunjukkan jumlah kerja yang dilaksanakan dalam periode yang ditentukan".

Kuantitas mengacu pada banyaknya hal kerja yang telah dikerjakan pada kurun waktu yang telah ditentukan. Kecepatan pegawai dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan waktu yang ditentukan juga merupakan indikasi kuantitas kerja.

1.6 HIPOTESIS

Hipotesis menurut Surachmad (1990:39) yaitu "sebuah kesimpulan yang belum final dan harus dibuktikan kebenarannya".

Adapun kriteria dari hipotesis menurut Moeljarto Tjokrowinoto (1986:40) adalah :

1. Mengekspresikan hubungan dua variabel atau lebih
2. Memungkinkan pengukuran atau pembuktian empiris
3. Harus diluar jangkauan judgement penelitian. Hipotesis tidak boleh subjektif
4. Tujuan harus spesifik sehingga bisa dibuktikan kebenarannya.

Sedangkan tujuan hipotesis menurut Koentjoroningrat (1986:24) adalah :

1. Memberikan tujuan yang tegas bagi penelitian
2. Membantu dalam penentuan arah dalam pembahasan penelitian dengan menentukan faktor-faktor yang relevan
3. Menghindari penelitian yang tidak terarah dan tidak bertujuan mengumpulkan data yang tidak berhubungan dengan masalah yang diteliti.

Berdasarkan uraian tersebut hipotesis bagi suatu penelitian menggunakan dua hipotesis yaitu :

1. Hipotesis Alternatif (H_a)

Ada pengaruh antara pengawasan langsung pimpinan terhadap efektifitas Penerimaan Asli Daerah (PAD) di Kantor Dinas Pendapatan Kabupaten Jember.

2. Hipotesis nol (H_o)

Tidak ada pengaruh antara pengawasan langsung pimpinan terhadap efektifitas Penerimaan Asli Daerah (PAD) di Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

1.7. DEFINISI OPERASIONAL

salah satu langkah yang harus ditempuh oleh peneliti dalam rangka menguji hipotesis penelitian adalah membuat definisi operasional dari masing-masing variabel yang diteliti, sehingga akan memudahkan untuk mengukur masing-masing variabel penelitian berdasarkan kenyataan empiris. Masri Singarimbun dan Effendi (1989:27) mengemukakan sebagai berikut : "Salah satu unsur yang sangat membantu komunikasi antar peneliti adalah definisi operasional, yang merupakan petunjuk tentang bagaimana suatu variabel diukur. Dengan membaca definisi operasional dalam suatu penelitian, peneliti akan mengetahui baik buruknya pengukuran tersebut".

Berdasarkan uraian di atas maka untuk membatasi secara tegas variabel penelitian yang telah dirumuskan dalam hipotesis serta agar dapat berhubungan dengan dunia empiris maka masing-masing variabel dari penelitian ini akan penulis operasionalisasikan sebagai berikut :

1. Operasionalisasi variabel Pengaruh (X) yaitu Pengawasan langsung Pimpinan di Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember
2. Operasionalisasi variabel Terpengaruh (Y) yaitu Efektifitas Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

1.7.1. Operasionalisasi variabel Pengaruh (X) yaitu Pengawasan langsung Pimpinan di Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Pengawasan langsung menurut Sujamto (1986:76) adalah sebagai berikut :

Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan dengan cara mendatangi dan melakukan pemeriksaan ditempat (on The Spot) terhadap objek yang diawasi. Dan pelaksanaannya dapat berbentuk inspeksi langsung dan pemeriksaan ditempat.

Selanjutnya indikator-indikator yang dapat diturunkan dari variabel tersebut adalah sebagai berikut :

a. Inspeksi Langsung

Sujamto (1986:167) memberikan definisi inspeksi langsung sebagai berikut :

Inspeksi langsung adalah kegiatan manejer untuk melihat langsung pelaksanaan pekerjaan ditempat (on the spot), untuk dimana perlu memberikan petunjuk-petunjuk kepada pelaksana dan bilamana perlu juga mengambil tindakan korektif untuk menjamin agar pekerjaan berjalan dan memperoleh hasil sesuai dengan rencana dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan.

Dari pengertian di atas, dapat diambil item-item sebagai berikut :

1. Aktivitas pimpinan dalam melihat secara langsung ke tempat pelaksanaan pekerjaan
2. Aktivitas pimpinan memberi petunjuk-petunjuk kepada bawahan.
3. Aktivitas pimpinan mengambil tindakan korektif atas pekerjaan bawahan

b. Pemeriksaan di tempat

Pemeriksaan ditempat menurut Sujamto (1986:123) sebagai berikut :

Pemeriksaan adalah segala sesuatu atau kegiatan dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan melalui pengamatan, pencatatan atau perekaman, penyelidikan atau penelaahan secara cermat dan sistematis serta melalui penilaian dan pengujian terhadap segala informasi yang dikaitkan dengan objek yang diperiksa dan menuangkan hasilnya dalam berita acara pemeriksaan.

Dari pendapat tersebut maka dapat ditarik item-item sebagai berikut :

1. Aktivitas pimpinan dalam mengamati hasil pelaksanaan tugas pegawai
2. Aktivitas pimpinan dalam mencatat hasil pelaksanaan tugas pegawai
3. Aktivitas pimpinan dalam menyelidiki secara cermat dan sistematis terhadap pelaksanaan tugas pegawai
4. Aktivitas pimpinan dalam menilai kebenaran pelaksanaan tugas pegawai
5. Aktivitas pimpinan dalam menguji kebenaran pelaksanaan tugas pegawai
6. Aktivitas pimpinan dalam membuat berita acara pemeriksaan

1.7.2. Operasionalisasi variabel Terpengaruh (Y) yaitu Efektifitas Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Konsep efektifitas seperti yang diungkapkan oleh Wilson dan Heyel (1972:102) bahwa "Efektifitas sebenarnya terdiri dari dua bagian besar yaitu kualitas kerja (Quality of work, dependability, attitude) dan kuantitas kerja (Quantity of work)".

Jadi pembahasan mengenai efektifitas ini, penulis menggunakan indikator :

- a. Kualitas kerja
- b. Kuantitas kerja

A. Kualitas Kerja

Menurut Wilson dan Heyel (1972:101) kualitas kerja adalah "hal-hal yang menunjukkan bagaimana sebaiknya ia melakukan apa yang dikerjakan, ketepatan, kelengkapan dan kerapian".

Berdasarkan hal tersebut, item-item yang dapat diambil oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Cara kerja pegawai di dalam melaksanakan tugas
2. Ketepatan pegawai di dalam melaksanakan tugas
3. Kelengkapan pegawai di dalam melaksanakan tugas
4. Kerapian pegawai di dalam melaksanakan tugas

B. Kuantitas kerja

Wilson dan Heyel (1972:101) mengatakan definisi tentang kuantitas yaitu, "hal-hal yang menunjukkan jumlah kerja yang dilaksanakan dalam periode yang ditentukan".

Item-item yang dapat ditarik dari pendapat di atas adalah :

1. Banyaknya hasil kerja yang dapat diselesaikan sesuai dengan target yang telah ditentukan
2. Banyaknya hasil kerja yang dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan

Selanjutnya untuk memudahkan pengukuran variabel-variabel yang terbagi dalam beberapa indikator di atas, maka dalam memberikan nilai atau skor dari masing-masing item yang tersaji, digunakan ukuran sebagai berikut :

1. Bila responden menjawab selalu, diberi skor 3
2. Bila responden menjawab kadang-kadang, diberi skor 2
3. Bila responden menjawab tidak pernah, diberi skor 1

Setelah item dari masing-masing indikator diberi nilai maka langkah selanjutnya adalah memisahkan pada masing-masing kategori yaitu tinggi dan rendah pada setiap item.

1.8. METODE PENELITIAN

Teknik penelitian merupakan langkah-langkah operasional yang dilakukan dalam suatu penelitian untuk mewujudkan tujuan penelitian yaitu untuk memperoleh hasil yang benar, objektif dan ilmiah. Pengertian metode research menurut Sutrisno Hadi (1989:4) sebagai berikut : "Metodologi research sebagaimana kita kenal sekarang memberikan garis-garis yang sangat keras. Maksudnya untuk menjaga agar pengetahuan yang dicapai dari suatu research mempunyai harga ilmiah yang setinggi-tingginya".

Sehubungan dengan pengertian di atas, dalam penelitian ini penulis menggunakan metode sebagai berikut :

1. Penentuan populasi
2. Metode penentuan sampel
3. Metode pengumpulan data
4. Metode analisa data

1.8.1. Penentuan populasi

Sebelum penelitian dilaksanakan, terlebih dahulu harus ditentukan wilayah yang akan dijadikan sebagai daerah penelitian, keseluruhan unsur yang ada diwilayah penelitian itu disebut populasi. Hal ini sesuai dengan pendapat Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi (1989:08) yang mengemukakan bahwa "Populasi atau universe adalah jumlah keseluruhan dari unit analisa yang ciri-cirinya akan diduga".

Berdasarkan pengertian di atas, pada tahun penelitian ini jumlah keseluruhan populasi adalah 100 orang, merupakan keseluruhan pegawai di Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

1.8.2. Metode penentuan sampel

Sampel adalah wakil atau contoh dari populasi yang diteliti. Oleh karena itu, sampel adalah merupakan bagian dari populasi, maka sampel harus dapat mewakili populasi. Hadi (1987:73) menyatakan "sebenarnya tidak ada ketetapan yang mutlak berapa persen sampel yang harus diambil dari populasi, ketidaktetapan yang mutlak ini tidak perlu menimbulkan keraguan pada penulis". Dari jumlah populasi di atas, diambil sampel sebanyak 30 orang terdiri dari seluruh kepala bagian, kepala sub bagian, kepala sub dinas dan kepala seksi di Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, dengan perincian sebagai berikut :

1. Kepala Bagian = 1 orang
2. Kepala Sub Bagian = 4 orang
3. Kepala Sub Dinas = 5 orang
4. Kepala Seksi = 20 orang

1.8.3. Metode pengumpulan data

Untuk mendapat keterangan dalam data yang berhubungan dengan objek penelitian yang akurat maka digunakan tehnik yang tepat. Adapun data yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi :

1. Data Primer yaitu data yang diperoleh dari responden secara langsung
2. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari responden yang biasanya diperoleh dari data sensus dan statistik kantor, buku literature, dokumen dan lainnya yang bersifat sebagai penunjang.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah :

- a. Teknik observasi
- b. Teknik Dokumentasi
- c. Teknik Interview
- d. Teknik kuesioner

A. Teknik observasi

Dalam mengadakan penelitian, teknik observasi diperlukan sekali karena dengan pengamatan dan pencatatan inilah peneliti dapat mengetahui secara langsung gejala-gejala yang diteliti.

Menurut Hadi (1984:26) yang dimaksud observasi adalah :

Sebagai metode ilmiah, observasi biasanya diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan dengan sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki. Dalam arti yang luas observasi sebenarnya tidak hanya terbatas pada pengamatan yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dengan teknik observasi penulis mengadakan pengamatan secara langsung pada objek penelitian serta mencatat gejala-gejala yang diteliti.

B. Teknik Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara untuk memperoleh data dengan cara menggali data-data, dokumen-dokumen serta surat-surat yang ada di daerah penelitian. Menurut Koentjoroningrat (1986:66) dokumentasi adalah "data yang tercantum dalam berbagai jenis dokumen itu merupakan satu-satunya alat untuk mempelajari masalah tertentu, antara lain karena tidak diobservasi lagi dan tidak dapat diingat lagi".

Teknik dokumentasi digunakan untuk mengetahui peristiwa-peristiwa yang terjadi di daerah penelitian. Pada dasarnya metode ini

merupakan sumber data sekunder yang melengkapi data primer yang telah diperoleh.

C. Teknik Interview

Teknik interview adalah cara memperoleh data dengan jalan mengajukan pertanyaan secara lisan dan dijawab secara lisan pula oleh responden.

Koentjoroningrat (1986:16) mengemukakan bahwa interview adalah sebagai berikut : "Metode wawancara atau interview mencakup cara yang dipergunakan oleh seseorang dalam suatu tugas tertentu mencoba untuk mendapatkan keterangan atau pendapat secara lisan dari seorang responden akan berhadapan muka dengan orang lain".

D. Teknik kuisisioner

Teknik ini merupakan suatu cara untuk mendapatkan data dengan jalan mengajukan pertanyaan secara tertulis yang disebut dengan kuisisioner kemudian dijawab secara tertulis juga oleh responden.

Pengertian kuisisioner menurut Koentjoroningrat (1986:87) adalah sebagai berikut : "Kuisisioner merupakan suatu daftar yang berisi rangkaian pertanyaan mengenai suatu hal atau dalam suatu bidang. Dengan demikian maka kuisisioner dimaksudkan sebagai suatu daftar pertanyaan untuk memperoleh data berupa jawaban dari responden".

Daftar pertanyaan atau kuisisioner tersebut tertutup, yang telah disediakan alternatif jawaban untuk setiap pertanyaan, sehingga responden tinggal memilih salah satu jawaban yang telah tersedia.

1.8.4. Metode analisa Data

Tahap analisa data merupakan tahap atau suatu langkah yang sangat penting dalam penelitian. Peneliti harus menentukan pola atau

metode analisis mana yang akan dipergunakan. Ada dua macam analisis yang sering digunakan, sebagaimana dikemukakan oleh Wignjosoebroto (Dalam Koentjoroningrat, 1991:269) yaitu :

Sesungguhnya analisis itu dapat dibedakan menjadi dua, yaitu Kualitatif dan Kuantitatif. Perbedaan ini sangat tergantung pada sifat data yang dikumpulkan oleh si peneliti. Apakah data yang dikumpulkan hanya sedikit, yang bersifat Monografis atau kasus-kasus (sehingga tidak dapat disusun ke dalam struktur klasifikasi), maka analisisnya pasti kualitatif. Lain halnya jika data yang dikumpulkan itu besar dan mudah diklasifikasikan kedalam kategori (dan oleh karenanya berstruktur), maka kedalam hal demikian analisa kuantitatiflah yang jelas harus dikerjakan.

Dalam penelitian ini data yang dikumpulkan dimasukkan dalam kategori-kategori yang berstruktur, sehingga bentuk analisa yang digunakan adalah analisa kuantitatif dengan memakai analisa Chi Square atau Kai kuadrat. Sesuai dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Cochran (Dalam Sidney siegel, 1994:137) sebagai berikut :

- Bila $N > 40$, gunakanlah X^2 dengan korelasi kontunitas,
- Kalau N ada diantara 20 dan 40, tes X^2 boleh dipakai jika semua yang diharapkan adalah 5 atau lebih. Jika frekuensi yang diharapkan yang terkecil kurang dari 5, pakailah tes fisher.
- Bila $N < 20$ gunakanlah tes fisher untuk kasus apapun.

Adapun rumus dari Kai kuadrat adalah

$$X^2 = \frac{N (|AD - BC| - \frac{N}{2})^2}{(A+B)(C+D)(A+C)(B+D)}$$

Keterangan :

- X^2 = Chi kuadrat
 N = Jumlah sampel yang diambil
 A, B, C, D = Frekuensi setiap sel yang akan diamati
 $(A+B), (C+D)$ = Jumlah frekuensi kejadian dalam baris
 $(A+C), (B+D)$ = Jumlah frekuensi dalam kolom

Jika X^2 hitung $> X^2$ tabel, maka H_0 ditolak dan H_a diterima

Jika X^2 hitung $< X^2$ tabel, maka H_0 diterima dan H_a ditolak

Berdasarkan Pendapat di atas, maka dalam penelitian ini teknik pengambilan sampel yang penulis gunakan adalah teknik proporsional stratified random sampling.

Selanjutnya untuk menguji hipotesis, penulis menggunakan analisis deskriptif melalui prosentase jawaban responden. Dalam hal ini analisa deskriptif digunakan sebagai penunjang analisa statistik dimuka. Hal tersebut sesuai dengan yang dikemukakan oleh Anto Dajan (1973:1) sebagai berikut : "analisa secara deskriptif merupakan bagian yang menyeluruh dari metode statistik dan merupakan prosedur yang wajar dikerjakan".

Dalam penulisan ini, tingkat prosentase jawaban responden oleh penulis digunakan sebagai ukuran untuk menentukan sejauh mana pengaruh pengawasan langsung pimpinan terhadap efektifitas penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kantor DIPENDA Kabupaten Jember.

1. Untuk Variabel pengawasan langsung pimpinan (X) dimana indikator inspeksi langsung pimpinan diperoleh 3 item, Indikator pemeriksaan di tempat diperoleh 6 item, dengan total skor tertinggi 25 dan skor terendah adalah 14, sehingga pengelompokan intervalnya adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Nilai tertinggi} - \text{nilai terendah}}{\text{Jumlah kelas}}$$

$$= \frac{25 - 14}{2} = \frac{11}{2} = 5,5 = 6$$

- Total skor 14 – 19 termasuk kategori rendah
 - Total skor 20 – 25 termasuk kategori tinggi
2. Untuk variabel efektifitas peningkatan penerimaan PAD (Y) dimana indikator kualitas kerja diperoleh 4 item dan 2 item untuk indikator kuantitas kerja . Dari kedua indikator tersebut diperoleh skor tertinggi

adalah 18 dan total skor terendah adalah 13, sehingga pengelompokan intervalnya adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Nilai tertinggi} - \text{nilai terendah}}{\text{Jumlah kelas}}$$

$$= \frac{18 - 13}{2} = \frac{5}{2} = 2,5 = 3$$

- Total skor 13 – 15 termasuk kategori rendah
- Total skor 16 – 18 termasuk kategori tinggi





II. DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

2.1. Pengantar

Deskripsi lokasi penelitian merupakan suatu gambaran ilmu penelitian yang peneliti sajikan dengan tujuan melengkapi data yang terhimpun di dalamnya dan agar dapat membantu peneliti dalam meneliti data lebih lanjut. Deskripsi penelitian yang tertuang dalam penulisan ini mempunyai nilai yang penting bagi penulis maupun pihak-pihak lainnya yang membutuhkan untuk mengetahui secara jelas tentang keadaan atau kondisi daerah yang menjadi obyek penelitian tersebut.

Berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 50 Tahun 2000 Tentang Pedoman Susunan organisasi Perangkat Daerah, maka dibuatlah Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 88 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

Dalam menjalankan otonomi yang nyata dan bertanggung jawab serta untuk memperoleh dana yang memadai dengan memperhatikan keadaan sosial ekonomi masyarakat, maka Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember dirasa perlu untuk disesuaikan dengan arus pembangunan, sehubungan dengan hal tersebut di atas, dirasa perlu untuk menyempurnakan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember yang telah ada (yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 88 Tahun 2000.

2.2 Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

2.2.1 Kedudukan Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Kedudukan DIPENDA adalah sebagai unsur pelaksanaan Pemerintah Kabupaten Jember dalam bidang Pendapatan Daerah.

Dinas ini dipimpin oleh seorang kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2.2.2 Tugas Pokok kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Mengenai tugas Dinas Pendapatan Daerah adalah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan koordinasi, perencanaan, pengendalian dan pelaksanaan dibidang pendapatan.

2.2.3 Fungsi Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember untuk menyelenggarakan tugasnya mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang pendapatan
2. Pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum
3. Pembinaan terhadap Unit Pelaksanaan Teknis Dinas dan Cabang Dinas dibidang pendapatan
4. Pengawasan dan pengendalian teknis dibidang pendapatan
5. Pengelolaan urusan ketatausahaan dinas
6. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh bupati

2.2.4 Susunan Organisasi Kantor Dinas Pendapatan Kabupaten Jember

Susunan organisasi Dipenda Kabupaten Jember adalah sebagai berikut:

- A. Kepala Dinas
- B. Bagian Tata Usaha
- C. Sub Dinas Program
- D. Sub Dinas pendataan dan Penetapan
- E. Sub Dinas Penagihan

- F. Sub Dinas Retribusi dan Pendapatan Lain-lain
- G. Sub Dinas Bagi Hasil Pendapatan
- H. Cabang Dinas
- I. Unit Pelaksana Teknis Dinas
- J. Unit Penyuluhan
- K. Unit Pendidikan dan Pelatihan Bidang Pendapatan Daerah
- L. Kelompok Jabatan Fungsional

A. Kepala Dinas

Kepala Dinas bertugas memimpin jalannya Dinas Pendapatan Daerah dalam melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dibidang pendapatan daerah dan tugas-tugas lainnya yang diserahkan oleh bupati kepadanya.

B. Bagian Tata Usaha

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan Administratif kepada seluruh organisasi dalam lingkungan Dinas Pendapatan Daerah.

Bagian Tata Usaha memiliki fungsi :

- Melaksanakan penyusunan rencana program dan pelaporan serta pembinaan organisasi tata laksana
- Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian dan kesejahteraan pegawai
- Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan dan gaji pegawai
- Melaksanakan penyusunan rumah tangga dan perlengkapan, surat-menyurat dan kearsipan
- Melaksanakan pelayanan teknis administratif kepada Kepala Dinas dan semua unit organisasi di lingkungan Dinas Pendapatan

- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pendapatan
- Bagian Tata Usaha terdiri dari :
 - Sub Bagian Keuangan
 - Sub Bagian Kepegawaian
 - Sub Bagian Perlengkapan
 - Sub Bagian Umum

C. Sub Dinas Program

Sub Dinas Program mempunyai tugas melakukan penyusunan program-program tahunan sebagai pelaksana program rencana lima tahunan dibidang pendapatan daerah dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Sub Dinas Program mempunyai fungsi:

- Membuat penyusunan raencana bidang pendapatan
- Membuat penyusunan kebijaksanaan bidang teknis serta program kerja tahunan bidang pendapatan daerah
- Membuat analisa terhadap penggalian potensi daerah melalui penelitian-penelitian
- Mengadakan koordinasi pada instansi terkait, instansi vertikal terhadap pengembangan pendapatan daerah
- Melakukan pemantauan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program kerja pendapatan daerah
- Menginventarisasikan permasalahan di bidang pendapatan daerah serta merumuskan langkah-langkah kebijaksanaan pemecahannya
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pendapatan

Sub Dinas Program terdiri dari :

- Seksi Penyusunan Program
- Seksi Pemantauan dan Pengendalian
- Seksi Pengembangan Pendapatan
- Seksi Evaluasi dan Pelaporan

D. Sub Dinas Pendataan dan Penetapan

Sub Dinas Pendataan dan Penetapan mempunyai tugas sebagai berikut :

- Melakukan Pendataan objek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Membantu melakukan pendataan objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak
- Melakukan penetapan jumlah Pajak daerah dan Retribusi Daerah yang terhutang
- Menata usahakan jumlah ketetapan pajak PBB yang penagohannya dilimpahkan kepada Daerah, berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dan Daftar Himpunan Pokok Pembayaran (DHPP) PBB

Sub Dinas Pendataan dan penetapan mempunyai fungsi:

- Melakukan peremajaan data objek dan data subjek Pajak / Retribusi Daerah untuk mengembangkan / peningkatan potensi
- Menghimpun dan mengelola data objek dan subjek Wajib Pajak/Retribusi Daerah melalui Surat Pemberitahuan Objek Pajak dan Retribusi Daerah
- Melakukan pemeriksaan lokasi/lapangan atas keberadaan objek Pajak/Retribusi Daerah yang tutup atas permohonan Wajib Pajak
- Melakukan penetapan dan penerbitan Surat ketetapan Pajak/Retribusi Daerah

- Melakukan pendaftaran Wajib Pajak/Retribusi Daerah melalui formulir pendaftaran serta menyusun daftar induk yang dengan pendaftaran dan pendataan
- Membantu melakukan penerimaan SPPT PBB beserta DHPP PBB dan dokumentasi PBB lainnya yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak serta mendistribusikan kepada Wajib Pajak dan Kepada Unit lain yang terkait
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pendapatan

Sub Dinas Pendataan dan Penetapan terdiri dari:

- Seksi Pendataan dan Pendaftaran
- Seksi Pengolahan Data dan Informasi
- Seksi Penetapan
- Seksi Pemeriksaan

E. Sub Dinas Penagihan

Sub Dinas Penagihan mempunyai tugas:

- Melaksanakan Penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah melampaui batas
- Melayani keberatan dan permohonan banding
- Melayani permohonan restitusi atas kelebihan pembayaran pajak/Retribusi Daerah
- Mengumpulkan dan mengolah data sumber-sumber penerimaan daerah lainnya di luar Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Sub Dinas Penagihan terdiri dari:

- Seksi Pembukuan dan Verifikasi
- Seksi Penagihan dan Perhitungan
- Seksi Restitusi dan Pemindahbukuan
- Seksi Pertimbangan dan Keberatan

F. Sub Dinas Retribusi dan Pendapatan Lain-lain

Sub Dinas Retribusi dan Pendapatan Lain-lain mempunyai tugas melakukan koordinasi dan merumuskan kebijakan teknis atas penengkatan penerimaan retribusi dan pendapatan lain-lain kepada instansi/unit-unit kerja terkait.

Sub Dinas Retribusi dan Pendapatan Lain-lain mempunyai Fungsi:

- Melakukan koordinasi dengan unit-unit kerja penghasil atas peningkatan/pengembangan potensi objek Retribusi Daerah dan Pendapatan lain-lain
- Merumuskan kebijakan yang bersumber dari Retribusi Daerah dan Pendapatan lain-lain
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pendapatan

Sub Dinas Retribusi dan Pendapatan lain-lain terdiri dari:

- Seksi Penata Usahaan Penerimaan Retribusi dan Pendapatan Lain-lain
- Seksi Penerimaan Lain-lain
- Seksi Penerimaan BUMD dan Pendapatan Lain-lain
- Seksi Legalisasi dan Pembukuan Surat-Surat Berharga

G. Sub Dinas Bagi Hasil Pendapatan

Sub Dinas Bagi Hasil Pendapatan mempunyai tugas melakukan koordinasi, pengkajian dan perumusan atas penerimaan pendapatan yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak

Sub Dinas bagi Hasil Pajak mempunyai fungsi:

- Membuat pengkajian atas perolehan penerimaan Bagi Hasil Pendapatan yang terdiri dari Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan

Pajak dan hasil kajian tersebut untuk dirumuskan dalam pengembangan perolehan penerimaan lebih lanjut

- Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Propinsi atas penerimaan Bagi Hasil Pendapatan yang bersumber dari bagi Hasil Pendapatan Pajak dan Bukan Pajak

Sub Dinas Bagi Hasil Pajak terdiri dari:

- Seksi Penata usahaan Bagi Hasil Pendapatan Pajak dan Non Pajak
- Seksi Bagi Hasil Pajak
- Seksi Bagi Hasil Bukan Pajak
- Seksi Peraturan Perundang-undangan dan Pengkajian Pendapatan

H. Cabang Dinas

Pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, dibentuk cabang dinas yang pembentukannya diatur melalui Peraturan Daerah Kabupaten Jember, yang mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 50 Tahun 2000 dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember, meliputi :

- a. Cabang Dinas Kotatiff
- b. Cabang Dinas 1
- c. Cabang Dinas 2
- d. Cabang Dinas 3

I. Unit Pelaksana Teknis Daerah

Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi kepada Wajib Pajak dan Wajib Retribusi Daerah atas pelaksanaan pungutan terhadap Pajak dan Retribusi Daerah.

J. Unit Penyuluhan

Unit Penyuluhan mempunyai tugas :

- Menyusun bahan penyuluhan dan melaksanakan kegiatan penyuluhan
- Menyampaikan informasi dan penerangan perpajakan dan retribusi Daerah serta pendapatan daerah lainnya
- Mengkoordinasi kegiatan penyuluhan di wilayah Kabupaten Jember

K. Unit Pendidikan dan Pelatihan

Unit Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas:

- Menyusun bahan pelatihan bidang pendapatan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan dan pelatihan atas pengembangan pendapatan daerah
- Mengkoordinasi kegiatan pelatihan pengembangan pendapatan di Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember
- Menginventarisasikan dan menyeleksi Pegawai Kantor Dinas Pendapatan Kabupaten Jember yang berpotensi untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia melalui pengiriman pelatihan pendidikan fungsional teknis bidang pendapatan
- Melakukan kerja sama dengan Perguruan Tinggi atas kegiatan pelatihan pendidikan bidang pendapatan daerah

L. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kabupaten Jember sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. Kelompok jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya dan setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Kantor

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember. Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban tenaga kerja serta jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.2.5. Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah

Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember dalam melaksanakan tugasnya mendapat pembinaan teknis fungsional dari Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Jawa Timur :

1. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas Pendapatan bertanggung jawab langsung kepada Bupati, sedangkan pertanggung jawaban atas bidang administrasi melalui Sekretaris Daerah
2. Setiap pemimpin satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Pendapatan bertanggung jawab memimpin, mengadakan koordinasi dan memberikan bimbingan atau petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas kepada bawahannya masing-masing
3. Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Pendapatan harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi sesuai dengan tugasnya.

2.3. Keadaan Pegawai

Pada organisasi Kantor Pendapatan Daerah Kabupaten Jember ditetapkan jumlah pegawai yang mengisi bagian-bagian yang ada dalam susunan organisasi sebanyak 100 orang. Penyebaran pegawai pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan

Golongan	jumlah
Roolstaat	33
I	-
II	21
III	45
IV	1
Total	100

Sumber: Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, 2002

Tabel 4. Jumlah Pegawai Berdasarkan Unit Kerja

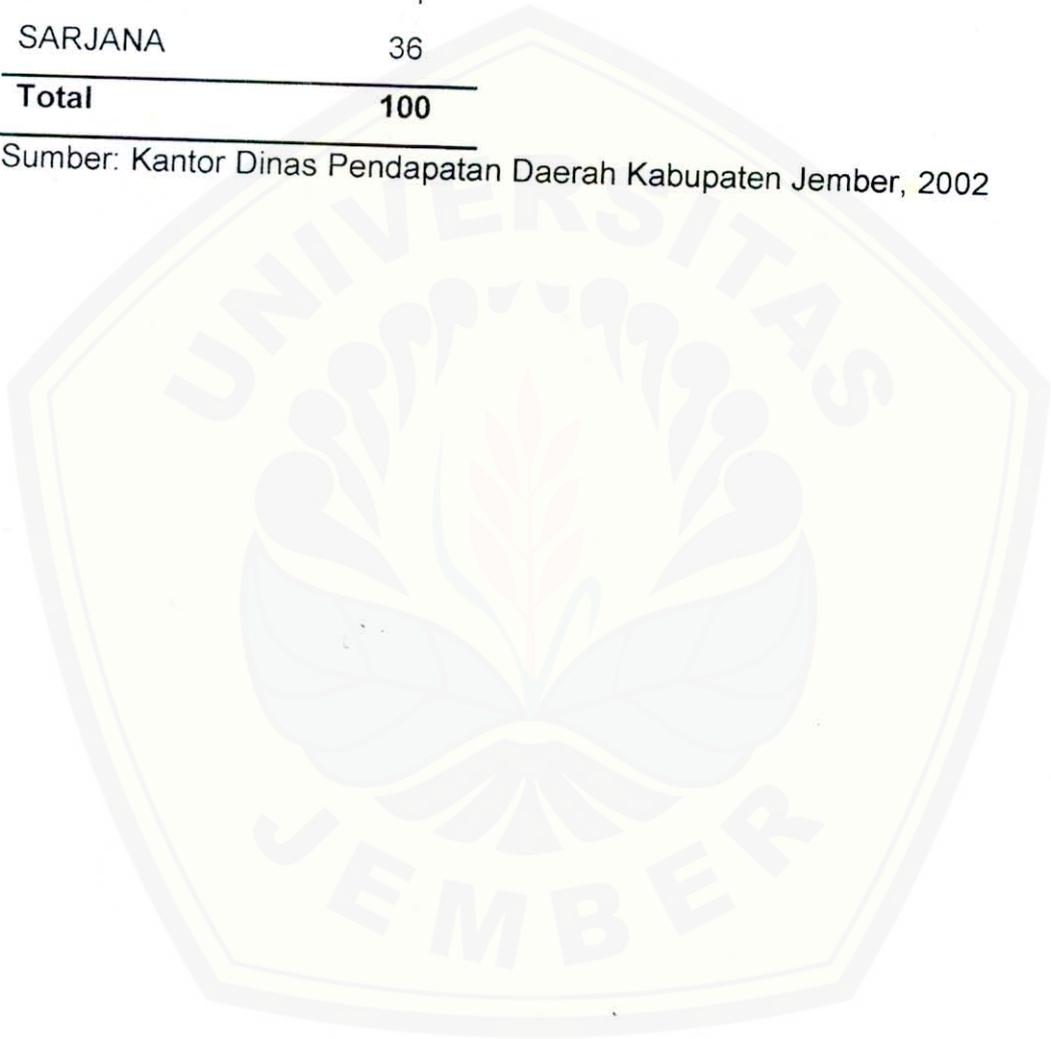
NO	Unit Kerja	Jumlah
1.	Kepala Dinas	1
2.	Bagian Tata Usaha	33
3.	Sub Dinas Program	12
4.	Sub Dinas Pendataan dan Penetapan	15
5.	Sub Dinas Penagihan	13
6.	Sub Dinas Retribusi dan Pendapatan Lain-lain	13
7.	Sub Dinas Bagi Hasil Pendapatan	13
Total		100

Sumber: Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, 2002

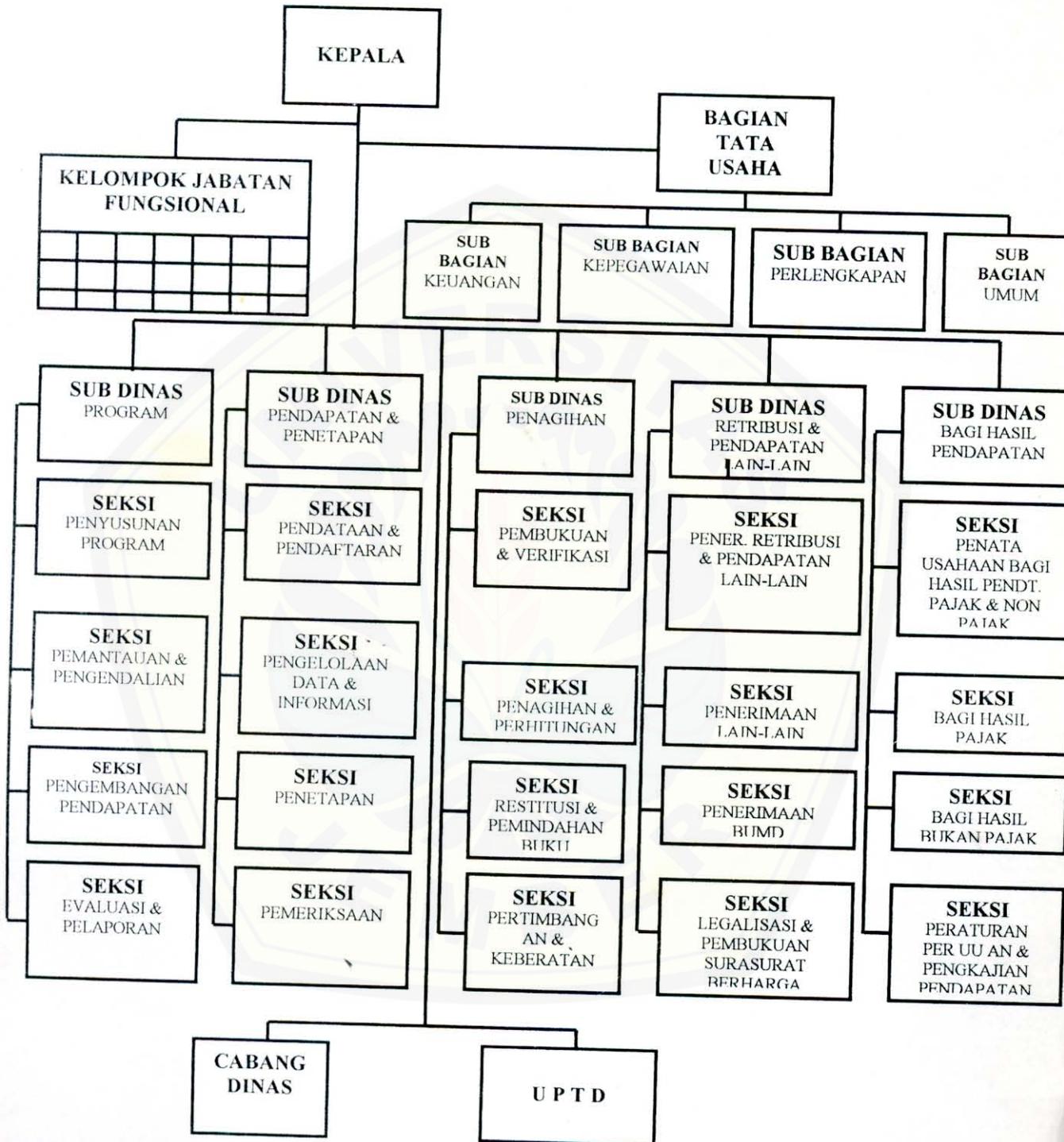
Tabel 5. Jumlah Pegawai Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Jumlah
SD	7
SMP	6
SMA	47
DIPLOMA	4
SARJANA	36
Total	100

Sumber: Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, 2002



**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
KANTOR DINAS PENDAPATAN KABUPATEN JEMBER**





III. PENYAJIAN DATA VARIABEL PENELITIAN

3.1 Pengantar

Untuk mengetahui tentang adanya pengaruh antara variabel-variabel penelitian, perlu adanya pembuktian yang lebih nyata dan rinci. Dalam bab ini terlebih dahulu akan diuraikan tentang variabel-variabel penelitian tersebut, untuk itu penulis menyajikan data-data yang mendasar pada skor dari masing-masing variabel yang didapat melalui kuisioner dengan menggunakan 30 responden hasil penelitian.

Adapun tujuan penyajian data adalah agar peneliti lebih mudah dalam memahami atau mempelajari gejala karakteristik dari masing-masing variabel penelitian. Penyajian data yang lebih jelas akan mempermudah peneliti dalam menjelaskan atau menggambarkan pengaruh variabel yang diteliti.

Data-data yang diperoleh kemudian disajikan dalam bentuk variabel-variabel penelitian yaitu :

- a. **Variabel Pengaruh (Independent variabel), yaitu Pengawasan langsung pimpinan di Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.**
- b. **Variabel Terpengaruh (Dependent variabel), yaitu Efektifitas peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.**

3.2 Operasionalisasi variabel pengaruh (X) yaitu Pengawasan langsung pimpinan

Untuk variabel X ini, penulis mengambil dua indikator yaitu :

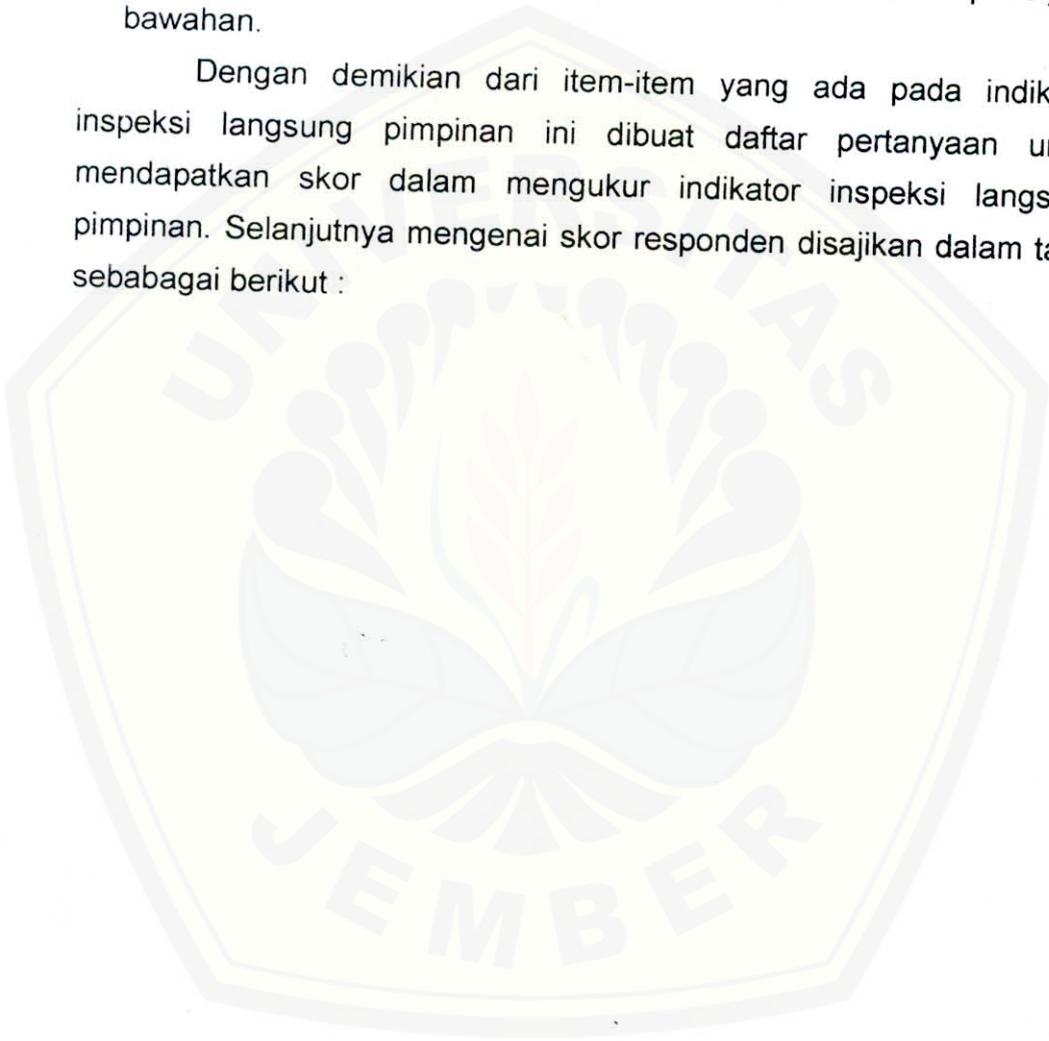
- a. **Inspeksi langsung pimpinan**
- b. **Pemeriksaan di tempat**

3.2.1 Indikator Inspeksi Langsung pimpinan

Item-item dari indikator inspeksi langsung adalah :

1. Aktivitas pimpinan dalam melihat secara langsung ke tempat pelaksanaan pekerjaan.
2. Aktivitas pimpinan memberi petunjuk-petunjuk kepada bawahan.
3. Aktivitas pimpinan mengambil tindakan korektif atas pekerjaan bawahan.

Dengan demikian dari item-item yang ada pada indikator inspeksi langsung pimpinan ini dibuat daftar pertanyaan untuk mendapatkan skor dalam mengukur indikator inspeksi langsung pimpinan. Selanjutnya mengenai skor responden disajikan dalam tabel sebabagai berikut :



Tabel 6. Skor jawaban responden terhadap indikator Inspeksi Langsung pimpinan

No	Skor responden			total
	1	2	3	
1.	3	3	3	9
2.	3	3	2	8
3.	3	3	3	9
4.	2	2	2	6
5.	3	2	3	8
6.	3	2	2	7
7.	3	3	2	8
8.	3	2	3	8
9.	3	2	3	8
10.	3	3	2	8
11.	2	2	3	7
12.	2	2	3	7
13.	3	2	2	7
14.	3	2	2	7
15.	3	2	2	7
16.	2	2	2	6
17.	3	2	3	8
18.	2	2	2	6
19.	3	2	3	8
20.	2	3	3	8
21.	3	3	2	8
22.	3	2	2	7
23.	3	3	2	8
24.	2	2	2	6
25.	2	2	3	7
26.	2	2	2	6
27.	3	2	2	7
28.	2	3	2	7
29.	3	2	2	7
30.	3	3	2	8

Sumber : Data primer diolah tahun 2002

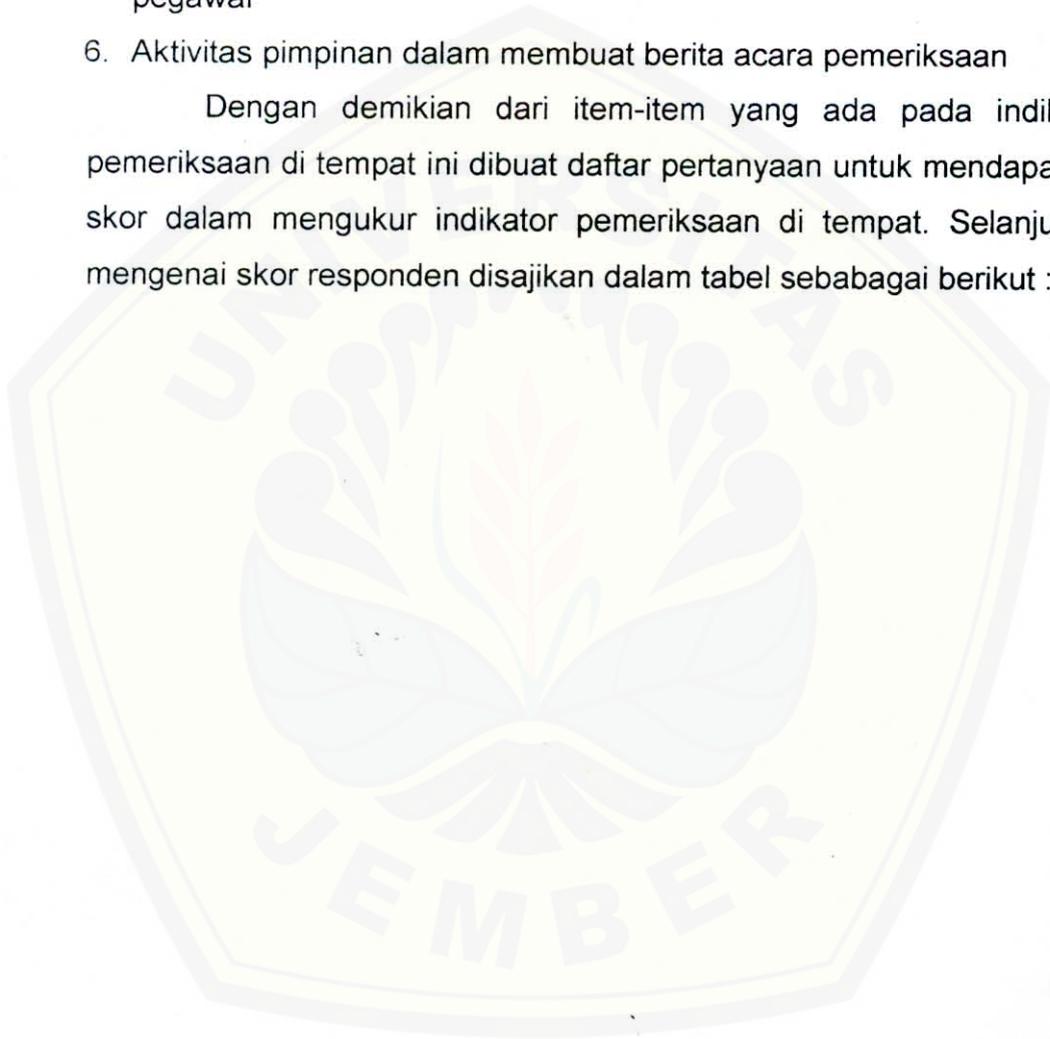
3.2.2 Indikator pemeriksaan di tempat

Item-item dari indikator pemeriksaan di tempat adalah :

1. Aktivitas pimpinan dalam mengamati hasil pelaksanaan tugas pegawai
2. Aktivitas pimpinan dalam mencatat hasil pelaksanaan tugas pegawai

3. Aktivitas pimpinan dalam menyelidiki secara cermat dan sistematis terhadap pelaksanaan tugas pegawai
4. Aktivitas pimpinan dalam menilai kebenaran pelaksanaan tugas pegawai
5. Aktivitas pimpinan dalam menguji kebenaran pelaksanaan tugas pegawai
6. Aktivitas pimpinan dalam membuat berita acara pemeriksaan

Dengan demikian dari item-item yang ada pada indikator pemeriksaan di tempat ini dibuat daftar pertanyaan untuk mendapatkan skor dalam mengukur indikator pemeriksaan di tempat. Selanjutnya mengenai skor responden disajikan dalam tabel sebagai berikut :



Tabel 7. Skor jawaban responden terhadap indikator pemeriksaan di tempat

No	Skor item-item						Total
	1	2	3	4	5	6	
1.	2	2	2	2	2	1	11
2.	3	2	2	2	2	1	12
3.	3	3	3	3	3	1	16
4.	2	2	2	2	2	2	12
5.	3	2	3	3	3	2	16
6.	3	3	2	2	3	2	15
7.	2	2	2	3	2	1	12
8.	3	2	2	3	2	2	14
9.	3	2	3	3	3	2	16
10.	3	2	2	2	3	2	14
11.	2	2	2	2	1	1	10
12.	3	3	3	3	3	2	17
13.	3	3	3	2	2	2	15
14.	2	3	2	3	3	2	15
15.	3	3	2	2	3	3	16
16.	2	2	1	1	1	1	8
17.	3	3	2	3	2	2	15
18.	3	2	2	3	2	1	13
19.	2	3	2	2	2	1	12
20.	3	3	3	3	2	1	15
21.	2	2	3	2	2	2	13
22.	2	2	2	2	2	2	12
23.	3	2	2	2	2	1	12
24.	2	2	2	2	2	2	12
25.	3	3	3	2	2	1	14
26.	2	2	3	3	3	2	15
27.	3	2	2	2	2	1	12
28.	2	2	3	2	3	2	14
29.	3	2	2	2	2	1	12
30.	2	3	3	3	3	2	16

Sumber : Data Primer diolah tahun 2002

Setelah dilakukan penghitungan skor untuk masing-masing indikator pada variabel X tersebut, selanjutnya membagi total skor ke dalam dua kategori, yaitu kategori tinggi dan rendah. Mengingat variabel X mempunyai 9 item, yaitu tiga 3 item untuk indikator inspeksi langsung pimpinan dan 6 item untuk indikator pemeriksaan di tempat. Dari kedua indikator tersebut diperoleh skor tertinggi adalah 25 dan total skor terendah adalah 14, sehingga pengelompokan intervalnya adalah sebagai berikut :

Nilai tertinggi – nilai terendah
 Jumlah kelas

$$= \frac{25 - 14}{2} = \frac{11}{2} = 5,5 = 6$$

- Total skor 14 – 19 termasuk kategori rendah
- Total skor 20 – 25 termasuk kategori tinggi

Tabel 8. Data skor jawaban responden terhadap Variabel pengaruh (X) yaitu Pengawasan langsung pimpinan

No	Indikator Variabel (X)		Total Skor	Kriteria
	Inspeksi langsung	Pemeriksaan di tempat		
1.	9	11	20	Tinggi
2.	8	12	20	Tinggi
3.	9	16	25	Tinggi
4.	6	12	18	Rendah
5.	8	16	24	Tinggi
6.	7	15	22	Tinggi
7.	8	12	20	Tinggi
8.	8	14	22	Tinggi
9.	8	16	24	Tinggi
10.	8	14	22	Tinggi
11.	7	10	17	Rendah
12.	7	17	24	Tinggi
13.	7	15	22	Tinggi
14.	7	15	22	Tinggi
15.	7	16	23	Tinggi
16.	6	8	14	Rendah
17.	8	15	23	Tinggi
18.	6	13	19	Rendah
19.	8	12	20	Tinggi
20.	8	15	23	Tinggi
21.	8	13	21	Tinggi
22.	7	12	19	Rendah
23.	8	12	20	Tinggi
24.	6	12	18	Rendah
25.	7	14	21	Tinggi
26.	6	15	21	Tinggi
27.	7	12	19	Rendah
28.	7	14	21	Tinggi
29.	7	12	19	Rendah
30.	8	16	24	Tinggi

Sumber : Data primer diolah tahun 2002

Data yang disajikan pada tabel di muka selanjutnya dimasukkan dalam tabel frekuensi kategori jawaban sehingga dapat diketahui lebih jelas pengawasan langsung pimpinan terhadap efektifitas peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember sebagai berikut :

Tabel 9. Frekuensi kategori jawaban responden terhadap tingkat pengawasan langsung pimpinan (X)

KRITERIA	FREKUENSI	PROSENTASI
TINGGI	22	$\frac{22}{30} \times 100 \% = 73,3 \%$
RENDAH	8	$\frac{8}{30} \times 100 \% = 26,7 \%$
JUMLAH	30	100 %

Sumber : Data primer diolah tahun 2002

Memperhatikan tabel frekuensi kategori jawaban responden tersebut, diketahui bahwa dari 30 orang responden yang diteliti, sebanyak 22 orang responden (73,3%) menyatakan tingkat pengawasan langsung pimpinan tergolong tinggi, sedangkan 8 orang responden (26,7%) menyatakan tingkat pengawasan langsung pimpinan tergolong rendah.

3.3 Operasionalisasi variabel Terpengaruh (Y) yaitu Efektifitas peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah

Untuk variabel Y ini, Penulis mengambil dua indikator, yaitu :

- a. Kualitas kerja
- b. Kuantitas kerja

3.3.1 Indikator kualitas kerja

Item-item dari indikator kualitas kerja, yaitu :

1. Cara kerja pegawai di dalam melaksanakan tugas
2. Ketepatan pegawai di dalam melaksanakan tugas
3. Kelengkapan pegawai di dalam melaksanakan tugas
4. Kerapian pegawai di dalam melaksanakan tugas

Dengan demikian dari item-item yang ada pada indikator kualitas kerja ini dibuat daftar pertanyaan untuk mendapatkan skor dalam mengukur indikator kualitas kerja. Selanjutnya mengenai skor responden disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 10. Skor jawaban responden terhadap indikator kualitas kerja

No	Skor item				Total
	1	2	3	4	
1.	3	3	3	3	12
2.	3	3	3	3	12
3.	3	2	3	2	10
4.	3	2	2	3	10
5.	3	3	3	3	12
6.	2	3	3	3	11
7.	2	3	3	2	10
8.	3	3	2	3	11
9.	2	3	3	3	11
10.	3	2	3	2	10
11.	2	3	3	2	10
12.	3	3	3	3	12
13.	3	2	3	3	11
14.	3	3	3	3	12
15.	3	2	2	2	9
16.	2	2	2	3	9
17.	3	2	3	2	10
18.	2	3	3	2	10
19.	3	2	3	3	11
20.	3	3	2	2	10
21.	3	3	3	3	12
22.	2	3	3	3	11
23.	3	3	2	2	10
24.	3	2	2	2	9
25.	3	2	3	3	11
26.	3	3	3	3	12
27.	2	3	3	3	11
28.	3	3	3	3	12
29.	2	2	2	2	8
30.	3	2	3	3	11

Sumber : Data primer diolah tahun 2002

3.3.2 Indikator kuantitas kerja

Item-item dari indikator kuantitas kerja, yaitu :

1. Banyaknya hasil kerja yang dapat diselesaikan sesuai dengan target yang telah ditentukan
2. Banyaknya hasil kerja yang dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan

Dengan demikian dari item-item yang ada pada indikator kuantitas kerja ini dibuat daftar pertanyaan untuk mendapatkan skor dalam mengukur indikator kuantitas kerja. Selanjutnya mengenai skor responden disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 11. Skor jawaban responden terhadap indikator kuantitas kerja

No	Skor item		Total
	1	2	
1.	3	3	6
2.	3	3	6
3.	3	2	5
4.	2	3	5
5.	3	3	6
6.	3	3	6
7.	3	3	6
8.	3	3	6
9.	3	3	6
10.	3	2	5
11.	3	2	5
12.	2	3	5
13.	3	2	5
14.	3	3	6
15.	2	3	5
16.	3	3	6
17.	3	3	6
18.	3	2	5
19.	3	2	5
20.	3	3	6
21.	2	3	5
22.	3	2	5
23.	2	3	5
24.	3	3	6
25.	3	2	5
26.	2	3	5
27.	3	3	6
28.	3	3	6
29.	2	3	5
30.	3	3	6

Sumber : Data primer diolah tahun 2002

Setelah dilakukan penghitungan skor untuk masing-masing indikator pada variabel Y tersebut, selanjutnya membagi total skor ke dalam dua kategori, yaitu kategori tinggi dan rendah. Mengingat variabel Y mempunyai 6 item, yaitu 4 item untuk indikator kualitas kerja dan 2 item untuk indikator kuantitas kerja. Dari kedua indikator tersebut diperoleh skor tertinggi adalah 18 dan total skor terendah adalah 13, sehingga pengelompokan intervalnya adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Nilai tertinggi} - \text{nilai terendah}}{\text{Jumlah kelas}}$$

$$= \frac{18 - 13}{2} = \frac{5}{2} = 2,5 = 3$$

- Total skor 13 – 15 termasuk kategori rendah
- Total skor 16 – 18 termasuk kategori tinggi

Tabel 12. Data skor jawaban responden terhadap Variabel Terpengaruh (Y) yaitu Efektifitas peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah

No	Indikator Variabel (Y)		Total Skor	Kriteria
	Kualitas kerja	Kuantitas Kerja		
1.	12	6	18	Tinggi
2.	12	6	18	Tinggi
3.	10	5	15	Rendah
4.	10	5	15	Rendah
5.	12	6	18	Tinggi
6.	11	6	17	Tinggi
7.	10	6	16	Tinggi
8.	11	6	17	Tinggi
9.	11	6	17	Tinggi
10.	10	5	15	Rendah
11.	10	5	15	Rendah
12.	12	5	17	Tinggi
13.	11	5	16	Tinggi
14.	12	6	18	Tinggi
15.	9	5	14	Rendah
16.	9	6	15	Rendah
17.	10	6	16	Tinggi
18.	10	5	15	Rendah
19.	11	5	16	Tinggi
20.	10	6	16	Tinggi
21.	12	5	17	Tinggi
22.	11	5	16	Tinggi
23.	10	5	15	Rendah
24.	9	6	15	Rendah
25.	11	5	16	Tinggi
26.	12	5	17	Tinggi
27.	11	6	17	Tinggi
28.	12	6	18	Tinggi
29.	8	5	13	Rendah
30.	11	6	17	Tinggi

Sumber : Data primer diolah tahun 2002

Data yang disajikan pada tabel dimuka selanjutnya dimasukkan dalam tabel frekuensi kategori jawaban sehingga dapat diketahui lebih jelas pengawasan langsung pimpinan terhadap efektifitas peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember sebagai berikut :

Tabel 13. Frekuensi kategori jawaban responden terhadap tingkat efektifitas peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Y)

KRITERIA	FREKUENSI	PROSENTASI
TINGGI	20	$\frac{20}{30} \times 100\% = 66,7\%$
RENDAH	10	$\frac{10}{30} \times 100\% = 33,3\%$
JUMLAH	30	100%

Sumber : Data primer diolah tahun 2002

Memperhatikan tabel frekuensi kategori jawaban responden tersebut, diketahui bahwa dari 30 orang responden yang diteliti, sebanyak 20 orang responden (66,7%) menyatakan tingkat efektifitas peningkatan penerimaan PAD pimpinan tergolong tinggi, sedangkan 10 orang responden (33,3%) menyatakan tingkat efektifitas peningkatan penerimaan PAD tergolong rendah.

Kemudian untuk memudahkan proses analisis data, dibuat klasifikasi data yaitu dengan menggabungkan kategori jawaban dari variabel X dan Y sebagai berikut :

Tabel 14. Klasifikasi kategori jawaban responden tentang pengaruh pengawasan langsung pimpinan terhadap efektifitas peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Kantor Dinas pendapatan Daerah Kabupaten Jember

No.	Variabel X	Variabel Y
1.	Tinggi	Tinggi
2.	Tinggi	Tinggi
3.	Tinggi	Rendah
4.	Rendah	Rendah
5.	Tinggi	Tinggi
6.	Tinggi	Tinggi
7.	Tinggi	Tinggi
8.	Tinggi	Tinggi
9.	Tinggi	Tinggi
10.	Tinggi	Rendah
11.	Rendah	Rendah
12.	Tinggi	Tinggi
13.	Tinggi	Tinggi
14.	Tinggi	Tinggi
15.	Tinggi	Rendah
16.	Rendah	Rendah
17.	Tinggi	Tinggi
18.	Rendah	Rendah
19.	Tinggi	Tinggi
20.	Tinggi	Tinggi
21.	Tinggi	Tinggi
22.	Rendah	Tinggi
23.	Tinggi	Rendah
24.	Rendah	Rendah
25.	Tinggi	Tinggi
26.	Tinggi	Tinggi
27.	Rendah	Tinggi
28.	Tinggi	Tinggi
29.	Rendah	Rendah
30.	Tinggi	Tinggi

Sumber : Data primer diolah tahun 2002



V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan interpretasi data yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan mengenai pengaruh pengawasan langsung pimpinan terhadap efektifitas penerimaan peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jember sebagai berikut :

1. Berdasarkan analisis data statistik, variabel X dan Variabel Y dengan tes Chi kuadrat diperoleh X^2 hitung = 6,16 dan X^2 tabel = 3,84 dimana taraf signifikasinya sebesar 5% atau $\alpha = 0,05$ dan db = 1, yang berarti nilai X^2 hitung (6,16) lebih besar dari X^2 tabel (3,84), sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima, yaitu ada pengaruh antara pengawasan langsung pimpinan terhadap efektifitas penerimaan peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jember.
2. Berdasarkan analisis data deskriptif yang ditujukan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh pengawasan langsung pimpinan terhadap efektifitas penerimaan peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jember, juga menunjukkan adanya pengaruh yang nyata dimana dapat dilihat dalam tabel 16 dan tabel 17 bahwa bila pengawasan langsung pimpinan sering dilakukan (78,52%) maka akan mengakibatkan efektifitas peningkatan penerimaan PAD tinggi pula (90,28%).

5.2. Saran

Berdasarkan bahasan di atas, dapat diketahui bahwa peningkatan pengawasan langsung pimpinan akan menyebabkan peningkatan efektifitas penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember. Maka disarankan bagi pimpinan Kantor Dinas

Pendapatan daerah Kabupaten Jember hendaknya lebih meningkatkan pengawasan langsung pimpinan sehingga efektifitas penerimaan Pendapatan Asli Daerah akan tercapai dan tujuan organisasi yang direncanakan akan tercapai pula.



DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. 1987. *Metode Research II*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Badan Penerbit Universitas Jember. 1998. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember.
- Dirjen DIKTI. DEPDIBUD. 1993. *UUD 1945, P4, GBHN, Tap-Tap MPR, Pidato Pertanggungjawaban Presiden*. Jakarta.
- Dajan, A. 1974. *Pengantar Metode Statistik Jilid I*. Jakarta: LP3ES.
- Gibson, Ivancevich, Donelly. 1996. *Organisasi dan Manajemen : Perilaku, Struktur dan Proses*. Surabaya: Erlangga.
- Gie, T L. 1981. *Efisiensi Kerja Bagi Pembangunan Negara*. Yogyakarta: Karya Pustaka.
- Hadi, S. 1984. *Metode Research III*. Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM.
- , 1989. *Metode Research II*. Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM.
- Handyaningrat, S. 1985. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi Negara dan Managemen*. Jakarta: CV. Haji Masagung.
- Handoko. 1997. *Manajemen Edisi II*. Yogyakarta: BP FE.
- Hasibuan, Malayu S. P. 1987. *Managemen Dasar Pengertian dan Masalah*. Jakarta: Haji Masagung.
- Hatta, M. 1970. *Pengantar Ke Jalan Ilmu Dan Pengetahuan*. Jakarta: PT. Pembangunan.
- Koentjoroningrat. 1986. *Metode-metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia.
- , 1991. *Metode-metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia
- Loedin, AA. 1976. *Pengetahuan Dasar Penelitian Dasar Dan Statistik*. Surabaya: PIRR.

- Manullang. 1985. *Dasar-dasar Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Musanef. 1991. *Manajemen Kepegawaian Di Indonesia*. Jakarta: Gunung Agung.
- Nawawi, H. 1993. *Pengawasan Melekat Dilingkungan Aparatur Pemerintah*. Jakarta: Erlangga.
- Ndraha. 1988. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bina Aksara.
- Sarwoto. 1994. *Dasar-dasar Organisasi Dan manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Siagian, SP. 1992. *Fungsi-fungsi Manajerial*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Siegel, S. 1994. *Statistik Non Parametik Untuk Ilmu Sosial*. Jakarta: Gramedia.
- Singarimbun, M dan S. Effendi. 1989. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES.
- Soejamto. 1986. *Beberapa Pengertian Dibidang Pengawasan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Supranto, J. 1988. *Metodologi Research dan Aplikasinya Dalam Pemasaran*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Surachmad, Winarno. 1990. *Pengantar Metodologi Research*. Bandung: Tarsito.
- Sutarto. 1989. *Dasar-dasar Kepemimpinan Administrasi*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Tjokrowinoto, M. 1986. *Tahap-tahap Penelitian Sosial*. Yogyakarta: IPM.
- Umar. 2000. *Riset Sumber Daya Manusia Dalam Organisasi*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Wilson dan Heyel. 1972. *Hand Book of Modern Office managment And Administrations*. Mc. Grawhill Inc.
- Winardi. 1989. *Perencanaan Dan Pengawasan Dalam Manajemen*. Bandung: Mandar Maju.

KUESIONER PENELITIAN

I. Identitas Peneliti

Nama : Cherry Dwi Risdianto
NIM : 95-186
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program studi : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Alamat : JL. Jawa VII/17 Jember

II. Pengantar

Dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan strata satu (S1) pada Jurusan Ilmu Administrasi, Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember, penulis diharuskan untuk menyelesaikan skripsi. Adapun judul skripsi yang kami susun adalah:

Pengaruh Pengawasan Langsung Pimpinan Terhadap Efektifitas Peningkatan Penerimaan Asli Daerah (PAD) Di Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Dalam upaya melengkapi data yang dibutuhkan, kami memohon dengan hormat kesediaan Bapak/Ibu/Saudara untuk membantu pencapaian tujuan penelitian ini dengan mengisi daftar pertanyaan yang telah kami sediakan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Perlu Bapak/Ibu/saudara ketahui, dalam hal ini tidak ada sangkut pautnya dengan tugas kedinasan dari Bapak/Ibu/Saudara sekalian melainkan hanya untuk kepentingan ilmiah semata dan kerahasiaan dari jawaban yang diberikan akan kami jaga sepenuhnya.

Atas kesediaan Bapak/Ibu/saudara meluangkan waktu untuk mengisi daftar pertanyaan ini kami sampaikan banyak terima kasih serta sebelumnya mohon maaf jika menemukan kata-kata yang kurang berkenan.

Hormat Kami

Cherry Dwi Risdianto

III. Petunjuk Pengisian

Dalam angket ini ada dua pertanyaan yaitu :

- a. Bagian pertama identitas responden (Bapak/Ibu/Saudara cukup mengisi pada tempat yang telah disediakan)
- b. Bagian kedua adalah daftar pertanyaan Mohon diberi tanda (X) pada jawaban yang dianggap paling benar.

IDENTITAS RESPONDEN

1. No. Responden :
2. Jenis Kelamin :
3. Jabatan :
4. Pendidikan :

DAFTAR PERTANYAAN,

I. Variabel Pengawasan Langsung Pimpinan (X)

A. Inspeksi langsung

1. Apakah pimpinan selalu melihat pelaksanaan pekerjaan/tugas yang Bapak/Ibu/Saudara lakukan?
a. Selalu b. Kadang-kadang c. Tidak Pernah
2. Apakah pimpinan selalu memberikan petunjuk-petunjuk mengenai pelaksanaan pekerjaan /tugas yang Bapak/Ibu/Saudara lakukan ?
a. Selalu b. Kadang-kadang c. Tidak Pernah
3. Apakah pimpinan selalu memberikan tindakan korektif atas pelaksanaan pekerjaan/tugas yang Bapak/Ibu/saudara lakukan ?
a. Selalu b. Kadang-kadang c. Tidak Pernah

B. Pemeriksaan ditempat

1. Apakah selama ini pimpinan Bapak/Ibu/Saudara selalu melakukan pengamatan terhadap pekerjaan Bapak/Ibu/Saudara ?
a. Selalu b. Kadang-kadang c. Tidak Pernah
2. Apakah selama ini pimpinan Bapak/Ibu/Saudara selalu melakukan pencatatan terhadap pekerjaan Bapak/Ibu/Saudara ?
a. Selalu b. Kadang-kadang c. Tidak Pernah
3. Apakah pimpinan Bapak/Ibu/Saudara selalu melakukan penyelidikan secara cermat dan sistematis terhadap pekerjaan Bapak/Ibu/Saudara?
a. Selalu b. Kadang-kadang c. Tidak Pernah
4. Apakah pimpinan Bapak/Ibu/Saudara selalu menilai terlebih dahulu informasi-informasi yang berkaitan dengan aktivitas dan hasil pekerjaan Bapak/Ibu/Saudara ?
a. Selalu b. Kadang-kadang c. Tidak Pernah

5. Apakah pimpinan Bapak/Ibu/Saudara selalu menguji terlebih dahulu informasi-informasi yang berkaitan dengan aktivitas dan hasil pekerjaan Bapak/Ibu/Saudara ?
 - a. Selalu
 - b. Kadang-kadang
 - c. Tidak Pernah
6. Sepengetahuan Bapak/Ibu/Saudara apakah selama ini hasil-hasil pengamatan, pencatatan dan penyelidikan yang dilakukan oleh pimpinan Bapak/Ibu/Saudara selalu dituangkan dalam berita acara pemeriksaan atau laporan tertulis lainnya ?
 - a. Selalu
 - b. Kadang-kadang
 - c. Tidak Pernah

II. Variabel Efektivitas (Y)

A. Kualitas kerja

1. Apakah cara kerja Bapak/Ibu/Saudara di dalam melaksanakan tugas selalu sesuai dengan yang telah ditentukan ?
 - a. Selalu
 - b. Kadang-kadang
 - c. Tidak Pernah
2. Apakah ketepatan Bapak/Ibu/Saudara di dalam melaksanakan tugas selalu sesuai dengan yang telah ditentukan ?
 - a. Selalu
 - b. Kadang-kadang
 - c. Tidak pernah
3. Apakah kelengkapan Bapak/Ibu/Saudara di dalam melaksanakan tugas selalu sesuai dengan yang telah ditentukan ?
 - a. Selalu
 - b. Kadang-kadang
 - c. Tidak pernah
4. Apakah kerapian Bapak/Ibu/Saudara di dalam melaksanakan tugas selalu sesuai dengan yang telah ditentukan ?
 - a. Selalu
 - b. Kadang-kadang
 - c. Tidak pernah

B. Kuantitas kerja

1. Apakah banyaknya hasil kerja yang dapat diselesaikan Bapak/Ibu/Saudara selalu sesuai dengan target yang telah ditentukan ?
 - a. Selalu
 - b. Kadang-kadang
 - c. tidak Pernah
2. Apakah banyaknya hasil kerja yang dapat diselesaikan Bapak/Ibu/Saudara selalu sesuai dengan waktu yang telah ditentukan ?
 - a. Selalu
 - b. Kadang-kadang
 - c. Tidak pernah



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
LEMBAGA PENELITIAN

Alamat : Jl. Kalimantan No.37 Telepon (0331) 337818, Jember (68118)
E-mail : lemlit unej @ jember. Telkom.net.id

Nomor : 319/J25.3.1/PL.5/2002
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Ijin melaksanakan Penelitian

28 Maret 2002

Kepada : Yth. Sdr. Kepala Badan Kesatuan Bangsa
Dan Perlindungan Masyarakat
Pemerintah Kabupaten Jember
di -

JEMBER.

Menunjuk surat pengantar dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember No. 1002/J25.1.2/PL.5/2002 tanggal 27 Maret 2002, perihal ijin penelitian mahasiswa :

Nama/NIM : CHERRY DWI RISDIANTO / 95-1186
Fakultas/Jurusan : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik / Administrasi Negara
Alamat : Jl. Jawa VII / 17 Jember.
Judul Penelitian : Pengaruh Pengawasan Langsung Pimpinan Terhadap Efektivitas Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Dati II Jember.
Lokasi : Dinas Pendapatan Daerah Dati II Jember.
Lama Penelitian : 6 (enam) bulan.

maka kami mohon dengan hormat bantuan serta perkenan saudara untuk memberikan ijin kepada mahasiswa bersangkutan dalam melaksanakan kegiatan penelitian sesuai dengan judul di atas.

Demikian atas kerjasama dan bantuan saudara disampaikan terima kasih.

Ketua,



DR. T. Sutikto, MSc.

NIP. 131 131 022

Tembusan Kepada Yth. :

1. Sdr. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember
2. Mahasiswa ybs.
3. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
BADAN KESATUAN BANGSA DAN LINMAS

Jl. Letjen. S. Parman no. 89 ☎ (0331) 337853 - Jember

Jember, 02 April 2002.

Nomor : 072/267/436.46/2002.
Sifat : Penting.
Lampiran : -
Perihal : Ijin Penelitian.

K e p a d a
Yth. Sdr. Ka. Dispenda Kab. Jember
di -
JEMBER

Memperhatikan surat dari Ketua Lembaga Penelitian Univ. Jember, tanggal 28 Maret 2002 Nomor : 319/J25.3.1/PL.5/2002, perihal permohonan ijin penelitian.

Demi kelancaran serta kemudahan dalam pelaksanaan ijin penelitian dimaksud, diminta kepada saudara untuk memberikan bantuan berupa data/keterangan seperlunya kepada :

N a m a : CHERRY DWI RISDIANTO /95-1186
Alamat : JL. JAWA VII / 17 JEMBER
Pekerjaan : MHS. FAK. ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIV. JEMBER.
Keperluan : PENELITIAN
J u d u l : PENGARUH HUBUNGAN LANGSUNG PIMPINAN TERHADAP EFEKTIVITAS PENINGKATAN PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN JEMBER.
W a k t u : TGL. 28 MARET 2002 S/D TGL. 28 SEPTEMBER 2002.
Peserta : -

Demikian atas bantuan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

An. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN LINMAS
KABUPATEN JEMBER
Kepala Bidang Kajian Strategis dan HAM



Drs. SANTIBAJA SOEJOETI
Penata Tk. I
NIP. 130 805 317

Tembusan : Kepada Yth,
Sdr. Rektor Univ. Jember.



Digital Repository Universitas Jember
PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENDAPATAN DAERAH

JALAN JEND. ACHMAD YANI NO. 4 TELP. 484935 JEMBER 68118

SURAT KETERANGAN

Nomor : 072/527/436.330/2002

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, menerangkan bahwa :

N a m a : CHERRY DWI RISDIANTO
N I M : 95 - 1186
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unej.
Judul Skripsi : Pengaruh Hubungan Langsung Pimpinan terhadap efektivitas peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jember.

telah melaksanakan penelitian selama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 17 Mei sampai dengan 17 juni 2002.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

DIBUAT DI : J E M B E R
PADA TANGGAL : 17 JUNI 2002



REKAPITULASI REALISASI PERFORMAN DAN LURUSKAN
 PAJAK / RETRIBUSI TAHUN ANGGARAN 2000
 Bulan Desember s/d Tgl. 31
 Tahun 2000

Halaman : 01

NO	KODE BUKU / RETRIBUSI	ANGGARAN	REALISASI - PERFORMAN			METERAN	
			S/D BULAN LEBIH	BULAN INI	S/D BULAN INI	KURANG	LEBIH
1	101. Retribusi Jasa Persewaan	205.000.000,00	204.501.425,00	5.001.250,00	316.502.675,00	0,00	7.702.675,00
2	102. Retribusi Sewa Bangunan	175.500.000,00	155.249.531,50	17.994.208,70	180.791.433,00	0,00	9.294.493,00
3	103. Retribusi Sewa Tanah	210.000.000,00	205.575.075,00	2.191.450,00	205.767.525,00	0,00	18.761.525,00
4	104. Retribusi Sewa Jalan	3.500.000.000,00	3.155.770.378,00	151.021.559,00	3.310.801.538,00	0,00	489.198.072,00
5	105. Retribusi Sewa Persewaan Bangunan, Gedung, dan Peralatan	40.000.000,00	74.255.813,05	301.112.616,42	107.095.894,47	0,00	17.045.699,47
6	106. Retribusi Sewa Bangunan	575.000.000,00	500.615.255,00	45.755.175,00	547.069.441,00	0,00	100.401.441,00
7	JUMLAH POS : 1.1.1	4.258.000.000,00	3.755.129.551,55	259.165.140,12	4.015.312.691,77	0,00	146.211.763,77
8	107. Retribusi Sewa Bangunan	6.271.005.500,00	4.906.603.117,00	375.841.065,00	5.282.741.210,00	0,00	44.744.710,00
9	108. Retribusi Sewa Bangunan	211.810.500,00	200.870.175,00	15.542.685,00	216.512.861,00	0,00	5.305.689,00
10	109. Retribusi Sewa Bangunan	50.185.000,00	49.041.750,00	4.551.520,00	53.593.270,00	0,00	5.361.530,00
11	110. Retribusi Sewa Bangunan	600.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000.000,00
12	JUMLAH POS : 1.1.2	6.150.000.000,00	5.165.711.072,00	396.165.759,00	5.562.871.441,00	0,00	44.744.710,00
13	111. Retribusi Sewa Bangunan	450.000.000,00	411.931.300,00	42.557.100,00	454.559.400,00	0,00	0,00
14	112. Retribusi Sewa Bangunan	20.000.000,00	65.224.500,00	1.570.100,00	72.594.600,00	0,00	994.605,00
15	113. Retribusi Sewa Bangunan	500.000.000,00	177.155.900,00	50.000.205,00	227.156.105,00	0,00	294.605,00
16	JUMLAH POS : 1.1.3	5.500.000.000,00	5.663.056.870,00	448.079.574,00	6.110.240.446,00	0,00	45.339.315,00

NO. URUT	JENIS PAKY / OFFICER	ANGGARAN	REALISASI - PENERIMAAN			KETERANGAN		
			S/D BULAH LALU	BULAH INI	S/D BULAH INI	%	KURANG	LEBIH
1	1000 (Pat. Delay, Persewa Ketersan)	72.000.000,00	51.884.350,00	4.810.050,00	56.694.400,00	79,74	15.305.600,00	0,00
2	1000 (Pat. Perganti, Biaya Detail)	10.000.000,00	20.955.000,00	5.276.000,00	26.242.000,00	145,78	0,00	8.242.000,00
3	1000 (Pat. Kertas, Trade Produk)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	1000 (Pat. Detail, Sipil)	10.000.000,00	20.955.000,00	5.276.000,00	26.242.000,00	145,78	0,00	8.242.000,00
5	1000 (Pat. Delay, Persewaan dan Persewaan Mawat)	400.000,00	396.000,00	0,00	396.000,00	99,00	4.000,00	0,00
6	1000 (Pat. Pelir d. 1000 31, Umum)	300.000.000,00	353.155.730,00	40.304.450,00	400.460.180,00	103,93	0,00	15.460.180,00
7	1000 (Pat. Paper 1)	1.150.550.000,00	1.078.664.000,00	107.960.950,00	1.186.625.000,00	106,16	0,00	70.055.980,00
8	1000 (Pat. Paper Umum)	110.500.000,00	98.457.355,00	11.020.600,00	110.379.955,00	99,17	1.120.045,00	0,00
9	1000 (Pat. Paper Besar)	1.040.050.000,00	1.178.091.325,00	109.090.550,00	1.287.181.845,00	105,47	1.120.045,00	70.055.980,00
10	1000 (Pat. Air Bersih)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	1000 (Pat. Persewaan Ketersan)	1.675.000,00	1.265.000,00	25.000,00	1.300.000,00	101,33	0,00	35.000,00
12	1000 (Pat. Pakse, 5, Detail Pata)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	1000 (Pat. Persew, Kality, Besar)	14.000.000,00	14.372.240,00	0,00	14.372.240,00	102,66	0,00	372.240,00
14	1000 (Pat. Sewa Tanah Bangunan)	27.500.000,00	11.109.346,00	14.029.007,00	25.138.353,00	91,48	2.341.647,00	0,00
15	1000 (Pat. Sewa Alat Berat)	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
16	1000 (Pat. Sewa Jar. Cetak Foto)	5.000.000,00	7.105.140,00	600.500,00	7.705.720,00	156,98	0,00	1.705.720,00
17	1000 (Pat. Guna Ganti)	47.500.000,00	36.606.726,00	14.560.587,00	51.167.313,00	107,94	2.341.647,00	6.110.960,00

JENIS PAJAK / PETERBUKSI	AMGGAH	REALISASI - PENERIMAAN				KETERANGAN	
		S/D BULAN HALU	BULAN INI	S/D BULAN INI	%	KURANG	LEBIH
1. Perseb. di atas air	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Pengalihan limbah air	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Perjual. Hasil Pad.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Defektif IPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Pengalihan Tanah Dinas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Baku Haya 1950	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. 1950 Perumahan Teror	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. 1950 Perumahan Teror	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. 1950	80.000.000,00	100.550.500,00	2.056.720,00	102.607.220,00	127,01	0,00	25.600.550,00
20. 1950	25.000.000,00	100.448.280,00	12.572.951,00	113.021.231,00	193,26	0,00	78.021.231,00
21. 1950	100.000.000,00	200.000.000,00	11.509.651,00	211.509.651,00	161,70	0,00	95.500.550,00
22. 1950	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. 1950	5.000.000,00	0.600.000,00	1.259.500,00	1.859.500,00	37,19	1.131.800,00	0,00
24. 1950	10.750.000,00	17.235.000,00	997.500,00	18.232.500,00	123,61	0,00	3.482.500,00
25. 1950	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. 1950	275.000.000,00	275.000.000,00	38.349.600,00	313.349.600,00	114,06	0,00	38.349.600,00
27. 1950	0.500.000.000,00	2.410.500.400,00	751.500.462,00	3.162.000.862,00	95,40	607.000.952,00	294.157.051,00
JUMLAH 000 1.1.0.							

NO.	JENIS PAKET / REFERENSI	ANGGARAN	REALISASI - PERIWAHAH			KETERANGAN			
			S/D BULAN HALU	BULAN INI	S/D BULAN INI	%	KURANG	LEBIH	
	000 11.02.1104 USHA DAERAH								
1	001 Dana Pembiayaan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	002 Perusahaan Daerah Apotik	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	5.100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3	003 Bedadung II	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4	004 Bedadung III	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		11.100.000,00	7.500.000,00	3.500.000,00	11.100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
5	005 Perusahaan Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
6	006 Perusahaan	2.231.538.167,84	2.231.538.167,84	0,00	2.231.538.167,84	100,00	0,00	0,00	0,00
7	007 Perusahaan Sekt	11.500.000,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	60,87	4.500.000,00	0,00	0,00
8	008 Perusahaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.231.538.167,84	2.231.538.167,84	3.500.000,00	2.231.538.167,84	99,50	4.500.000,00	0,00	0,00
	000 11.02.1104 USHA DAERAH								
9	001 Dana Pembiayaan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	002 Perusahaan Daerah Apotik	900.000.000,00	358.900.000,00	30.657.205,00	389.560.000,00	194,78	0,00	0,00	189.560.000,00
11	003 Bedadung II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	004 Bedadung III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		900.000.000,00	358.900.000,00	30.657.205,00	389.560.000,00	194,78	0,00	0,00	189.560.000,00
13	005 Perusahaan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	006 Perusahaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	007 Perusahaan Sekt	5.500.000,00	5.500.000,00	232.250,00	5.602.000,00	101,85	0,00	0,00	300.000,00
16	008 Perusahaan	501.101.115,00	551.000.100,00	10.145.500,00	569.239.800,00	97,23	16.181.260,00	0,00	0,00
17	009 Perusahaan	30.000.000,00	11.500.500,00	29.501.937,00	41.000.500,00	136,70	0,00	0,00	11.000.500,00
		600.000.000,00	635.000.450,00	70.528.000,00	705.511.540,00	122,50	16.181.260,00	0,00	200.871.720,00

JUMELAH

NO. POST	JENIS PAJAK / RETRIBUSI	ANGGARAN	REALISASI - PERHITUNGAN				KETERANGAN		
			S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI	%	KURANG	LEBIH	
	PAJAK PBT, BCG, PENGADAI, YANG BERKASAL PERB. PTM, PINTAR DAN ATAU INST. YANG LEBIH TINGGI								
	POK : 1.0.01 HASIL PAJAK								
	1.000 Pajak dan Retribusi (PDR)	1.000.000.000,00	10.856.596.588,00	1.837.408.615,00	12.694.005.203,00	181,11	0,00	5.695.005.203,00	
	1.001 Dana Bantuan dan Atas Tanah dan Bangunan dan RUMAH	325.000.000,00	405.175.449,00	38.594.914,00	473.771.363,00	145,76	0,00	148.771.363,00	
	1.002 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	2.000.000.000,00	1.099.344.577,42	1.640.354.785,31	2.669.699.362,73	133,48	0,00	669.699.362,73	
	1.003 BUNYAN PDR 1.0.01	9.364.000.000,00	12.321.117.614,42	3.516.258.214,31	15.837.375.828,73	169,68	0,00	6.503.475.828,73	
	1.004 1.0.02 HASIL BUNYAN PUNYAN								
	1.001 Bunan Hasil Hutan 1.000 1	20.000.000,00	52.920.145,82	21.052.665,00	73.972.810,82	369,86	0,00	53.972.810,82	
	1.002 Bunan Hasil Perikanan Hutan 1.000 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.003 Penerimaan Hak Tanah Negara Hutan 1.000 1	0,00	60.346.524,75	5.403.485,00	66.751.989,75	0,00	0,00	66.751.989,75	
	1.004 Hibridant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.005 Pab. dan Bunan Hutan Penerimaan Hibridant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.006 BUNYAN PDR 1.0.01	20.000.000,00	113.246.650,57	27.456.150,00	140.724.800,57	703,62	0,00	120.724.800,57	

KETERANGAN

REALISASI - PENERIMAAN

NO. AYAT	JENIS PALAK / RETRIBUSI	ANGGARAN	REALISASI - PENERIMAAN				KETERANGAN	
			S/D BULAH LALU	BULAH INI	S/D BULAH INI	%	KURANG	LEBIH
	REKAPITULASI							
	JUMLAH POS : 1.2.1	4.358.300.000,00	3.756.128.551,65	259.185.140,12	4.015.313.691,77	92,13	489.199.072,00	146.211.763,77
	JUMLAH POS : 1.2.2	9.537.952.001,00	9.413.537.638,00	781.503.462,00	9.195.041.100,00	95,40	637.067.952,00	294.157.051,00
	JUMLAH POS : 1.2.3	2.267.138.167,84	2.257.036.167,84	5.600.000,00	2.262.638.167,84	99,80	4.500.000,00	0,00
	JUMLAH POS : 1.2.4	820.921.116,00	935.073.456,00	70.538.092,00	1.005.611.548,00	122,50	16.181.290,00	200.871.722,00
	JUMLAH BAGIAN : 1.2.	16.984.311.284,84	15.361.777.813,49	1.113.826.694,12	16.478.604.507,61	97,02	1.146.947.314,00	641.240.536,77
	JUMLAH POS : 1.3.1	9.334.000.000,00	12.321.117.614,42	3.516.358.314,31	15.837.475.928,73	159,88	0,00	6.503.475.928,73
	JUMLAH POS : 1.3.2	20.000.000,00	113.268.650,57	27.456.150,00	140.724.800,57	703,62	0,00	120.724.800,57
	JUMLAH BAGIAN : 1.3.	9.354.000.000,00	12.434.386.264,99	3.543.814.464,31	15.978.200.729,30	170,82	0,00	6.624.200.729,30
	JUMLAH SELURUHNYA	26.338.311.284,84	27.796.164.078,48	4.660.641.158,43	32.456.805.236,91	123,23	1.146.947.314,00	7.285.441.266,07

Jember, 11 Januari 2001

DINAS PERCAPAIAN DAERAH
KABUPATEN JEMBER
Ka.Sie. Pembinaan dan Pelaporan



SRI WILUJENG

P e n a t a
NIP. 510 050 313

NO	KOD	JENIS PAJAK / RETRIBUSI	ANGGARAN	REALISASI - PEMERINTAH				KETERANGAN	
				S/D BULAN YALU	BULAN INI	S/D BULAN INI	*	PURANG	LEBIR
		BAGIAN 1.7 BENDASASI DAERAH							
		POS 1.7.1 PAJAK DAERAH							
1	1004	Pj. Hotel dan Restoran	260.000.000,00	6.237.475,00	6.237.475,00	293.783.910,00	112,99	0,00	33.783.910,00
2	1005	Pj. Hiburan	215.000.000,00	8.339.000,00	8.339.000,00	179.984.250,00	83,71	35.015.750,00	0,00
3	1006	Pj. Reklamasi	300.000.000,00	7.621.000,00	7.621.000,00	336.091.400,00	112,03	0,00	36.091.400,00
4	1007	Pj. Peningkatan Jalan	5.200.000.000,00	991.410.483,00	991.410.483,00	5.590.529.506,00	107,32	0,00	380.529.506,00
5	1008	Pj. Pengambilan dan Pengul. Bahan Galian Gol. C	95.000.000,00	667.120,00	667.120,00	95.998.208,92	101,05	0,00	998.208,92
6		Pj. Pem. Air Rumah Ratah	600.000.000,00	47.278.650,00	47.278.650,00	675.452.351,00	112,58	0,00	75.452.351,00
		JUMLAH POS : 1.7.1	6.670.000.000,00	1.061.553.728,00	1.061.553.728,00	7.161.839.625,92	107,37	35.015.750,00	526.855.375,92
		BAGIAN 1.7.2 RETRIBUSI DAERAH							
1	1001	Ret. Pelayanan Kesehatan :							
		a. RSHP	7.000.000.000,00	722.776.925,00	722.776.925,00	6.996.338.092,07	98,82	83.661.907,93	0,00
		b. PRR	340.000.000,00	0,00	0,00	326.210.812,00	95,94	13.789.188,00	0,00
		c. Asuhan	80.000.000,00	11.310.800,00	11.310.800,00	110.245.890,00	137,81	0,00	30.245.890,00
		JUMLAH POS 1.7.2	7.560.000.000,00	734.087.725,00	734.087.725,00	7.432.794.794,07	99,10	97.451.095,93	30.245.890,00
		JUMLAH POS 1.7	14.230.000.000,00	1.795.641.453,00	1.795.641.453,00	14.594.634.419,99	126,52	132.476.845,93	627.099.265,92
		JUMLAH KEMERDEKAAN	1.915.000.000,00	134.479.750,00	134.479.750,00	1.904.764.835,00	99,47	25.183.800,00	12.349.635,00
		JUMLAH	16.145.000.000,00	1.930.121.203,00	1.930.121.203,00	16.499.400.254,99	126,99	157.660.645,93	739.138.900,92

NO.	AYAT	JENIS PAJAK / REKIBISI	ANGGARAN	REALISASI - PENERIMAAN			KETERANGAN		
				S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI	+	KURANG	LEBIH
2	002	Ret. Palay. Persam/kebarsi.	72.000.000,00	124.448.050,00	12.486.470,00	136.934.470,00	170,19	0,00	64.934.470,00
3	003	Ret. Penggant. Biaya Cetak:	70.000.000,00	137.377.500,00	2.273.000,00	139.600.500,00	698,00	0,00	119.600.500,00
		a. Kartu Janda Penduduk	0,00	92.686.000,00	3.585.000,00	96.271.000,00	0,00	0,00	96.271.000,00
		b. Buku Catatan Sipil	70.000.000,00	230.013.500,00	5.858.000,00	235.871.500,00	1.179,36	0,00	215.871.500,00
4	004	Ret. Palay. Pemakaman dan Pengshuan Mayat	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00	0,00	0,00
5	005	Ret. Parkir di tepi Jl. Uluw	510.596.000,00	496.825.950,00	36.096.250,00	532.922.200,00	104,37	0,00	22.326.200,00
6	006	Ret. Pasar :							
		a. Pasar Uluw	1.650.000.000,00	1.677.575.775,00	132.199.470,00	1.809.775.245,00	109,68	0,00	159.775.245,00
		b. Pasar Hewan	150.000.000,00	108.699.000,00	7.950.000,00	116.649.000,00	77,77	0,00	33.351.000,00
			1.800.000.000,00	1.786.274.775,00	140.149.470,00	1.926.424.245,00	107,02	0,00	159.775.245,00
7	007	Ret. Air Bersih	0,00	0,00	0,00	0,00			
8	008	Ret. Pemadam kebakaran	1.500.000,00	2.453.000,00	47.000,00	2.500.000,00	166,67	0,00	1.000.000,00
9	010	Ret. Pengg. R. Cetak Peta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	017	Ret. Pemak. Kekay. Daerah :							
		a. Sesa Tanah Rangunan	9.000.000,00	8.977.300,00	450.000,00	9.427.300,00	104,75	0,00	427.300,00
		b. Sesa Alat Berat	32.000.000,00	42.930.500,00	0,00	42.930.500,00	134,16	0,00	10.930.500,00
		c. Sesa Lap. Dlah Kaga	16.000.000,00	5.360.300,00	0,00	5.360.300,00	33,50	0,00	0,00
		d. Busah Dinas	10.000.000,00	14.820.180,00	3.572.050,00	18.392.180,00	183,92	0,00	8.392.180,00
			67.000.000,00	72.088.280,00	4.022.050,00	76.110.280,00	113,60	0,00	19.749.980,00

NO. LAYAN	JENIS PAJAK / RETRIBUSI	ANGGARAN	REALISASI - PENERIMAAN				KETERANGAN	
			S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI	±	KURANG	LEBIH
11	013 Ret. Ps. Grosir dan/Partic.; a. Izpat Palalangan Ikan b. Penjualan Kios	10.000.000,00 0,00	10.872.287,00 0,00	841.100,00 0,00	11.713.387,00 0,00	117,13 0,00	0,00 0,00	1.713.387,00 0,00
12	014 Ret. Terminal	10.000.000,00	10.872.287,00	841.100,00	11.713.387,00	117,13	0,00	1.713.387,00
13	015 Ret. Izpat Khusus Parkir	525.000.000,00	520.227.000,00	50.794.800,00	571.021.800,00	108,77	0,00	46.021.800,00
14	016 Ret. Izpat Penelitian Anak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	017 Ret. Izpat. Pasangrahan : a. Rebahangan b. Kebnagang	100.000.000,00 72.500.000,00	80.000.000,00 56.000.000,00	25.000.000,00 4.000.000,00	105.000.000,00 60.000.000,00	105,00 82,76	0,00 12.500.000,00	5.000.000,00 0,00
16	018 Ret. Penyedotan Kaku	172.500.000,00	136.000.000,00	29.000.000,00	165.000.000,00	95,65	12.500.000,00	5.000.000,00
17	019 Ret. Rumah Potong Hewan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	020 Ret. Izpat Pendaf. Kapal	113.000.000,00	99.136.750,00	13.806.250,00	112.943.000,00	99,95	57.000,00	0,00
19	021 Ret. Ip. Rekre. dan D.Raga : a. Walu Hln b. Patean c. Pasaban d. Puger	0,00 75.000.000,00 45.000.000,00 8.000.000,00 0,00	0,00 40.747.300,00 39.320.500,00 3.000.000,00 2.000.000,00	0,00 37.603.100,00 7.030.000,00 5.000.000,00 1.500.000,00	0,00 78.350.400,00 46.350.500,00 8.000.000,00 3.500.000,00	0,00 104,47 103,00 100,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 3.350.400,00 1.350.500,00 0,00 3.500.000,00
		128.000.000,00	85.067.800,00	51.133.100,00	136.200.900,00	106,41	0,00	8.200.900,00

NO. AYAT	JENIS PAJAK / RETRIBUSI	ANGGARAN	REALISASI - PEMERINTAH				KETERANGAN	
			S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI	±	KURANG	LEBIH
20	077 Ret. Penyeb. di atas air	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	073 Ret. Pengolahan limbah air	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	024 Ret. Penj. Prod. H. Daerah :							
	a. Penjualan Bibit Padi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b. Penfara IRI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c. Pengolahan limbah Binas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d. Rudi Daya Ikan	47.500.000,00	38.104.500,00	17.067.500,00	55.172.000,00	116,15	0,00	7.672.000,00
23	025 Ret. Izin Penggunaan Tanah	47.500.000,00	38.104.500,00	17.067.500,00	55.172.000,00	0,00	0,00	7.672.000,00
24	076 Ret. Izin Mendirikan Bang. :							
	a. Kotip	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b. PU Cipta Karya	100.000.000,00	120.696.575,00	12.245.371,00	132.941.946,00	132,94	0,00	32.941.946,00
		105.000.000,00	171.713.422,50	3.267.629,00	174.981.051,50	166,65	0,00	69.981.051,50
25	077 Ret. Izin Tempat Penjualan	205.000.000,00	292.409.997,50	15.513.000,00	307.922.997,50	150,21	0,00	102.922.997,50
	Minuman Beralkohol	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	028 Ret. Izin Gangguan	6.000.000,00	5.772.800,00	726.500,00	6.499.300,00	108,32	0,00	499.300,00
27	029 Ret. Izin Irayek	18.000.000,00	17.292.500,00	1.875.000,00	19.167.500,00	106,49	0,00	1.167.500,00
28	030 Ret. Izin Pengambilan Hasil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	031 Ret. Jasa Iunggu	435.000.000,00	397.257.200,00	54.280.400,00	451.537.600,00	103,80	0,00	16.537.600,00
	Jumlah Pos 1.2.2.	13.546.596.000,00	17.783.736.543,57	1.302.264.265,00	14.086.000.808,57	103,98	179.182.595,93	715.988.404,50

NO.	LAYAT	JERIS PAJAK / RETRIBUSI	ANGGARAN	REALISASI - PENERIMAAN			KURANG	LEBIH	KETERANGAN
				S/D BULAN LAJU	BULAN INI	S/D BULAN INI			
		POS : 1.2.3. LARA USAHA DAERAH							
1	001	Bank Pembangunan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	002	Perusahaan Daerah Apotik :							
		a. Padadung I	5.400.000,00	0,00	5.400.000,00	0,00	0,00		
		b. Padadung II	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	0,00	0,00		
		c. Padadung III	3.900.000,00	1.400.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00		
			11.900.000,00	1.400.000,00	11.900.000,00	0,00	0,00		
2	003	PD. Patrabumi Argopuro	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00	0,00	0,00		
3	004	PD. Perkebunan	2.250.000.000,00	0,00	2.250.000.000,00	0,00	0,00		
4	005	PD. Perairahan Susu	18.150.000,00	0,00	18.150.000,00	0,00	0,00		
5	006	PD. Pertambangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	007	PD. Air Minum (PDAM)	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00	0,00	6.350.000,00	
		JUMIAH POS 1.2.3	2.318.050.000,00	1.400.000,00	2.324.400.000,00	100,27	0,00	6.350.000,00	
		POS : 1.2.4. LAIN - LAIN PRADAPATAN							
1	001	Ksl. Penj. Proq. Mlk. Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	002	Jaka Giro	500.000.000,00	109.815.643,31	1.207.446.198,19	241,49	0,00	707.446.198,19	
3	003	Sumbangan Pihak ke III Daerah (IPTGR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	004	Sel. Kel. Pemayanan Ipd. Pihak ke III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	005	Benda Kelerak. Pelaksa. Pekerjaan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	006	Angs. Cicilan Kend. Berotr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	007	Angs. Cicilan Rumah Dinas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	008	Pemeriksaan Penggantian Sapi	0,00	375.585.000,00	397.900.000,00	0,00	0,00	397.900.000,00	
9	010	Pengend. Pemeliharaan Pohon di luar kawasan hutan	0,00	571.000,00	11.654.300,00	145,68	0,00	3.654.300,00	
10	011	Pemeriksaan lain -lain	25.000.000,00	90.334.418,16	1.240.717.407,86	4.962,87	0,00	1.215.717.407,86	
11	012	P E R I R	60.000.000,00	2.302.200,00	39.482.228,00	65,80	0,00	0,00	
		JUMIAH POS 1.2.4	507.000.000,00	578.608.591,47	2.897.200.134,05	488,57	0,00	2.324.717.906,05	

NO.	LAYAT	JENIS PAJAK / RETRIBUSI	ANGGARAN	REALISASI - PEMERINTAH				KETERANGAN	
				S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI	±	KURANG	LEBIH
		RAG. 1.3. BAG. PENDAPAT. YANG PERASAL PEMB. PEMERINTAH DAN ATAU INST. YANG LEBIH TINGGI							
		POS : 1.3.1 BAGI HASIL PAJAK							
1	001	Pj. Ruzi dan Bangunan (PRB)	20.000.000.000,00	2.068.334.142,00	14.550.635.332,00	72,75	5.449.364.668,00	0,00	0,00
2	002	Bes Peroleh Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHB)	470.000.000,00	492.356.624,00	1.589.467.771,00	321,16	0,00	1.039.467.771,00	0,00
3	003	Pj. Hasil Pj Penghasil Psl. 21	0,00	1.362.879.394,00	3.674.995.930,00	0,00	0,00	0,00	3.674.995.930,00
4	004	Pj. Bahan Bakar Kendaraan Perentor (PBKB)	2.000.000.000,00	0,00	3.071.573.238,18	153,58	0,00	0,00	1.071.573.238,18
5	005	Pj. Kendaraan Perentor (PKP)	0,00	910.746.081,00	1.821.492.162,00	0,00	0,00	0,00	1.821.492.162,00
6	006	Bes Balik Nama Kendaraan Perentor (BRKB)	0,00	936.851.351,00	1.873.702.702,00	0,00	0,00	0,00	1.873.702.702,00
		JUMLAH POS 1.3.1	22.470.000.000,00	5.771.167.592,00	26.501.867.135,18	117,94	5.449.364.668,00	9.481.231.803,18	
		POS : 1.3.2 BAGI HASIL BUKAN PAJAK							
1	001	Turan Hasil Hutun (THH)	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00
2	002	Turan Hasil Pengusahaan Hutun (THPH)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	003	Landrent.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	004	Pen. dari Turan /Turan Eksploitasi/Royalti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	005	SRA. Daya Alam Bertambang	0,00	1.508.142,84	1.508.142,84	0,00	0,00	0,00	1.508.142,84
6	006	Minyak Bumi	0,00	78.816.544,00	315.266.176,00	0,00	0,00	0,00	315.266.176,00
7	007	Gas Alam	0,00	216.185.143,00	864.660.572,00	0,00	0,00	0,00	864.660.572,00
8	010	Pemberian Hak Tanah Negara	50.000.000,00	1.151.300,00	25.707.416,00	51,41	24.292.584,00	0,00	0,00
		JUMLAH POS 1.3.2	100.000.000,00	297.641.129,84	1.207.142.306,84	1.297,14	74.292.584,00	1.181.434.890,84	

NO.	AYAT	JEMIS PAJAK / RETRIBUSI	ANGGARAN	REALISASI - PEMERINTAH			KURANG	LEBIH
				S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI		
		R F K A P I T I U I A S I						
1		JUMLAH POS : 1.2.1	6.670.000.000,00	1.061.553.728,00	7.161.839.625,92	107,37	35.015.750,00	
2		JUMLAH POS : 1.2.2	13.546.596.000,00	1.302.264.265,00	14.086.000.808,57	103,98	179.182.595,93	
3		JUMLAH POS : 1.2.3	2.318.050.000,00	1.400.000,00	2.324.400.000,00	100,27	0,00	
4		JUMLAH POS : 1.2.4	593.000.000,00	578.608.591,47	2.897.200.134,05	488,57	20.517.772,00	
		JUMLAH BAGIAN : 1.2	23.177.646.000,00	2.943.826.584,47	26.169.440.568,54	114,45	234.716.117,93	
5		JUMLAH POS : 1.3.1	22.470.000.000,00	5.771.167.592,00	26.501.867.135,18	117,94	5.449.364.668,00	
6		JUMLAH POS : 1.3.2	180.000.000,00	297.641.129,84	1.207.142.306,84	1.207,14	74.292.584,00	
		JUMLAH BAGIAN : 1.3	22.570.000.000,00	6.068.808.721,84	27.709.009.442,02	122,77	5.523.657.252,00	
		JUMLAH SELURUHNYA	45.697.646.000,00	9.012.635.306,31	54.178.450.010,56	118,56	5.758.373.369,93	

Jember, 08 Januari 2002

DINAS PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN JEMBER
Ka. Sub Dinas Program

Drs. E. KHUMARI

NIP. 510 061 544

Tabel C. Tabel Harga-harga Kritis Chi-Kuadrat



Kemungkinan di bawah H_0 bahwa $\chi^2 \geq$ chi-kuadrat

df	.99	.98	.95	.90	.80	.70	.50	.30	.20	.10	.05	.02	.01	.001
1	0.0044	0.0054	0.0071	0.0087	0.0119	0.0155	0.0201	0.0270	0.0347	0.0446	0.0564	0.0700	0.0871	0.1083
2	0.0100	0.0125	0.0160	0.0193	0.0257	0.0332	0.0435	0.0562	0.0714	0.0890	0.1096	0.1337	0.1615	0.1939
3	0.0175	0.0216	0.0277	0.0339	0.0443	0.0561	0.0714	0.0890	0.1096	0.1337	0.1615	0.1939	0.2318	0.2749
4	0.0260	0.0316	0.0398	0.0480	0.0618	0.0767	0.0959	0.1186	0.1449	0.1749	0.2087	0.2463	0.2878	0.3332
5	0.0354	0.0425	0.0529	0.0634	0.0796	0.0970	0.1186	0.1449	0.1749	0.2087	0.2463	0.2878	0.3332	0.3836
6	0.0457	0.0543	0.0669	0.0800	0.0983	0.1186	0.1449	0.1749	0.2087	0.2463	0.2878	0.3332	0.3836	0.4394
7	0.0569	0.0669	0.0816	0.0964	0.1166	0.1386	0.1649	0.1949	0.2287	0.2663	0.3078	0.3532	0.4036	0.4594
8	0.0690	0.0803	0.0969	0.1127	0.1339	0.1569	0.1829	0.2129	0.2467	0.2843	0.3258	0.3712	0.4216	0.4774
9	0.0820	0.0946	0.1129	0.1297	0.1519	0.1759	0.2019	0.2319	0.2657	0.3033	0.3448	0.3902	0.4406	0.4964
10	0.0959	0.1099	0.1299	0.1477	0.1709	0.1959	0.2219	0.2519	0.2857	0.3233	0.3648	0.4102	0.4606	0.5164
11	0.1107	0.1261	0.1479	0.1667	0.1909	0.2169	0.2429	0.2729	0.3067	0.3443	0.3858	0.4312	0.4816	0.5374
12	0.1264	0.1432	0.1669	0.1867	0.2119	0.2389	0.2649	0.2949	0.3287	0.3663	0.4078	0.4532	0.5036	0.5594
13	0.1429	0.1609	0.1869	0.2077	0.2339	0.2609	0.2869	0.3169	0.3507	0.3883	0.4298	0.4752	0.5256	0.5814
14	0.1602	0.1794	0.2079	0.2297	0.2569	0.2839	0.3109	0.3369	0.3707	0.4083	0.4498	0.4952	0.5456	0.6014
15	0.1783	0.1987	0.2289	0.2517	0.2789	0.3059	0.3319	0.3579	0.3917	0.4293	0.4708	0.5162	0.5666	0.6224
16	0.1971	0.2187	0.2499	0.2737	0.3009	0.3269	0.3529	0.3789	0.4127	0.4503	0.4918	0.5372	0.5876	0.6434
17	0.2166	0.2394	0.2719	0.2967	0.3239	0.3499	0.3759	0.4019	0.4357	0.4733	0.5148	0.5602	0.6106	0.6664
18	0.2368	0.2607	0.2949	0.3207	0.3479	0.3739	0.3999	0.4259	0.4597	0.4973	0.5388	0.5842	0.6346	0.6904
19	0.2577	0.2827	0.3179	0.3447	0.3719	0.3979	0.4239	0.4499	0.4837	0.5213	0.5628	0.6082	0.6586	0.7144
20	0.2793	0.3054	0.3419	0.3697	0.3969	0.4229	0.4489	0.4749	0.5087	0.5463	0.5878	0.6332	0.6836	0.7394
21	0.3016	0.3287	0.3659	0.3947	0.4219	0.4479	0.4739	0.4999	0.5337	0.5713	0.6128	0.6582	0.7086	0.7644
22	0.3246	0.3527	0.3909	0.4207	0.4479	0.4739	0.4999	0.5259	0.5597	0.5973	0.6388	0.6842	0.7346	0.7904
23	0.3483	0.3774	0.4169	0.4477	0.4749	0.4999	0.5259	0.5519	0.5857	0.6233	0.6648	0.7102	0.7606	0.8164
24	0.3727	0.4027	0.4429	0.4747	0.5019	0.5269	0.5519	0.5779	0.6117	0.6493	0.6908	0.7362	0.7866	0.8424
25	0.3977	0.4287	0.4699	0.5027	0.5299	0.5549	0.5799	0.6059	0.6397	0.6773	0.7188	0.7642	0.8146	0.8704
26	0.4233	0.4554	0.4979	0.5317	0.5589	0.5839	0.6089	0.6349	0.6687	0.7063	0.7478	0.7932	0.8436	0.8994
27	0.4495	0.4827	0.5259	0.5607	0.5879	0.6129	0.6379	0.6639	0.6977	0.7353	0.7768	0.8222	0.8726	0.9284
28	0.4763	0.5104	0.5549	0.5907	0.6179	0.6429	0.6679	0.6939	0.7277	0.7653	0.8068	0.8522	0.9026	0.9584
29	0.5037	0.5387	0.5839	0.6207	0.6479	0.6729	0.6979	0.7239	0.7577	0.7953	0.8368	0.8822	0.9326	0.9884
30	0.5317	0.5677	0.6129	0.6507	0.6779	0.7029	0.7279	0.7539	0.7877	0.8253	0.8668	0.9122	0.9626	1.0184